ANALISIS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP)DILIHAT DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Kelurahan Ladang Cakiah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam

Oleh :

YULIA SAFITRI
NIM. 3212.114

JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI BUKITTINGGI

1437 H / 2016 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul: **"Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam", Studi Kasus Di Kelurahan Ladang Cakiah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh.** yang disusun oleh saudari **Yulia Safitri BP. 3212.114** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, Juni 2016

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Iiz Izmuddin, MA	**Widya Syafitri, M.Pd**
NIP. 19750303 200112 1007	**NIP. 19800726 201503 2002**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: **"ANALISIS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN P2KP DILIHAT DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Kelurahan Ladang Cakiah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh)"**, yang disusun oleh saudari **YULIA SAFITRI NIM. 3212.114**, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, hari SENIN tanggal 29 Agustus 2016 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.

Bukittinggi, September 2016

TIM PENGUJI

Ketua

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP.19621110 199903 1001

Anggota

Penguji Utama

H. Harfandi,SE, M.Si
NIP.19621110 199903 1001

Pendamping
(Pembimbing)

Dr. Iiz Izmuddin, MA
NIP. 19750303 200112 1007

Sofia Ridha, M.Ag
NIP. 19700827 200212 2001

Widya Syafitri, M.Pd
NIP. 19800726 201503 2002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1001

Bismillahirrahmanirrahim

Dalam sembah sujud

Ku berdo'a dalam keagungan-mu

Dijalan lurusmu seringku mengingkari

Tunjukan hambamu jalan menuju surga-mu

Setiap do'a ku lafazkan puji syukur atas segala rahmat dan karunia-mu

Jadikan hambamu insan yang bertaqwa untuk dunia dan akhirat

Saat ku lelah menghadapi semua

Saat ku terjatuh dalam kesulitan

Hingga pertolongan-mu datang memberi jalanku

Memang jalan hidup tak selalu lurus

Mata batinku berbisik bahwa hidup adalah suatu tantangan yang butuh kesabaran

Semua akan tercipta bila ada usaha

Terimakasih tuhan atas segala anugrah-mu

Beribu kasih dan cinta

Ku persembahkan kepada ibunda

Dalam dekap pelukmu

Inginku berkata " kau adalah pahlawan, kau adalah segalanya"

Salam hangat bersimpuh dikakimu atas segala cucuran keringatmu untukku

Yang menuntunku dari buaian hingga ku menjadi dewasa

Maaf atas segala salah yang membuat luka dalam jiwa

Semoga do'a mu bisa membuatku jadi orang yang berguna

Beribu kata dan harta takkan bisa membayar kasihmu dalam hidupku

Beribu canda dan tawa takkan menggantikan jasamu

Terima kasih ibu

Semoga kebahagiaan menuntunmu dalam dunia dan akhirat

Salam hangat buat kakak-kakak ku (Risnawati, Tisnawati, Andrizal, Rozi) dan adik- adikku Yelmi dan Silva

Membantu saat tak mampu

Semangatku ada atas segala suppotmu

Membuka jalanku saatku tak tahu arah kemana akan melangkah

Terima kasih atas jasamu kakak-kakaku dan adik-adikku

Salam hormat untuk semua dosen-doden IAIN BUKITTINGGI

Kepada karyawan dan karyawati

Telah membantu segala keperluan selama menjalani perkuliahan

Yang telah memberika ilmu pengetahuan

Beranjak dari awal perkuliahan hingga mencapai wisuda

Salam canda dan tawa, suka dan duka untuk semua sahabat-sahabatku

Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku

Membuat senyum saat ku lemah

Semua takkan pernah lupa

Sahabat-sahabatku .....

“salam sayang dan rindu kepada semua yang tercinta da;am hidup”

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan petunjuk-Nya untuk memilih jalan-jalan yang penuh dengan tebaran berkah, karunia, ilmu serta hikmah. Shalawat beserta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan yang kita cintai Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ilmu dan inspirator kita semua, karena dengan jasa beliaulah sampai saat ini kita masih dapat menikmati indahnya Islam, nikmatnya Iman dan ajaran perdamaian yang dibawa oleh Islam. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Ekonomi Islam untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam. Adapun judul pada skripsi ini adalah "**Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam". (studi Kasus di Kelurahan Ladang Cakiah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh).**

Penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Terutama kepada segenap keluarga yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik itu moril maupun materil, teristimewa kepada Ibunda tercinta **Anita** serta kepada adek **Yelmi Mega Sari** dan **Silva Selti** dan kakak tersayang tersayang **Rozi, Andrizal Risnawati, Tisnawati** yang telah memberikan dukungan dan butiran-butiran do'a nya kepada penulis.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis juga kepada:

1. **Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum**, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bapak **Harfandi, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Bapak **Yefri Joni, MA** selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di IAIN Bukittinggi.
2. Bapak **Iiz Izmuddin, MA** selaku pembimbing I dan ibu **Widya Syafitri**, **M.Pd** selaku pembimbing II dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah Bapak dan ibu berikan selama penulis menyelesaikan skripsi.
3. Ibu **Hesi Eka Puteri, SE, MSi** selaku penasehat akademik yang telah memberikan nasehatnya demi kelancaran proses belajar penulis.
4. Bapak/ibu pegawai perpustakaan yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/ibu dari kantor Kelurahan Ladang Cakiah yang telah meluangkan waktu beliau dalam membantu saya untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai skripsi saya.
6. Bapak/ibu dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis bisa melanjutkan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi.
7. Teman - teman seperjuangan di Ekonomi Islam khususnya Keluarga Besar NR EI /12. Serta teman-teman Sejurusan Ekonomi Islam dan Syari'ah yang telah memotivasi penulis. Semoga bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Amin.

8. Teman-teman sesama berkerja di konveksi Misra yang telah memberikan motivasi dalam menyelasaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan masukan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sajikan karya tulis dalam bentuk skripsi dengan harapan bisa bermanfaat bagi kita semua serta dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Bukittinggi, Juni 2016

Penulis,

Yulia Safitri

NIM. 3212.114

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI
DAFTAR TABEL
DAFTAR BAGAN
KATA PENGANTAR.....i
DAFTAR ISI.....iv
ABSTRAK.....vii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Identifikasi Masalah.....5
C. Batasan Masalah.....6
D. Rumusan Masalah.....6
E. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....6
F. Penjelasan Judul.....7
G. Sistematika Penulisan.....10

BAB II LANDASAN TEORI
A. Landasan Umum Tentang Kemiskinan.....11
1. Pengertian Kemiskinan.....11
2. Gejala-gejala kemiskinan.....11
B. Landasan Syariah Terhadap Kemiskinan.....13
1. Pengertian Kemiskinan.....13
2. Jenis-jenis Kemiskinan.....15
3. Bahaya Kemiskinan.....16
4. Cara Mengentaskan Kemiskinan dalam Islam.....18
5. Pandangan Islam Mengenai Kemiskinan.....22
C. Kebijakan Dalam Penggunaan Dana Dalam Islam.....23
D. Pengertian Pembiayaan.....24
E. Distribusi Pendapatan Dalam Islam.....25
F. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).....26
1. Visi dan Misi dari P2KP.....27
2. Tujuan Pemberian Pembiayaan Oleh P2KP.....28
G. Kajian Terdahulu.....29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian.....32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....32
C. Sumber Data.....33
D. Teknik Pengumpulan Data.....33
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....34

BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Profil Kelurahan Ladang Cakiah.....36

B. Kondisi Umum Masyarakat Kelurahan Ladang Cakiah 37
1. Tingkat Pendidikan 37
2. Mata Pencaharian 38
3. Struktur Kelurahan Ladang Cakiah 39
C Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Keluahan Ladang Cakiah 40
1. Prinsip dan Nilai P2KP 40
2. Sasaran,Pendekatan, Prinsip dan Strategi P2KP 45
3. Kelayakan Peminjam 47
3. Kriteria Kelayakan BKM 48
4. Ketentuan Pinjaman Bergulir 49
5. Tujuan Penggunaan Pembiayaan 51
6. Besar Pinjaman 51
7. Angsuran Pinjaman 52
D. Ketentuan Pembiayaan Modal Usaha Kepada Warga Miskin dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Ladang Cakiah 59

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 66
B. Saran 68
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : **"PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN P2KP DILIHAT DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Kelurahan Ladang Cakiah Aur Birugo Tigo Baleh)",** skripsi ini ditulis oleh YULIA SAFITRI, NIM 3212.114, Fakultas Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1437 H / 2016.

Alasan penulis diangkatnya masalah ini menjadi sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi karena penulis melihat bahwa dalam pembiayaan modal usaha kepada masyarakat miskin di Kelurahan Ladang Cakiah masih banyak masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kesimpangsiuran dalam penyaluran dana kepada masyarakat, kurang bijaksananya dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang diberi pinjaman merasa leluasa terhadap pinjaman itu.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perspektif Ekonomi Islam dalam studi kasus pada Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) khususnya dalam pembiayaan modal usaha di Kelurahan Ladang Cakiah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap ketentuan dalam pembiayaan modal usaha kepada warga miskin di Kelurahan Ladang Cakiah Aur Birugo Tigo Baleh.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu menjelaskan pembiayaan modal usaha kepada masyarakat miskin dalam pandangan Ekonomi Islam. Diukur dengan cara wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah 1 orang dari Kantor Kelurahan dan 4 orang *informan* masyarakat miskin di Kelurahan Ladang Cakiah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Dalam mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara langsung terhadap informan, penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Setelah data terkumpul penulis mengolah data merangkum, memilih-milih hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting saja dengan teknik analisa deskriptif yang berhubungan dengan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dalam perspektif Ekonomi Islam.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penyaluran dana kepada masyarakat miskin terjadinya ketidakadilan, ketidakjujuran, ketidakmerataan yang seharusnya mendapatkan pembiayaan modal usaha tetapi tidak mendapatkan, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal oleh masyarakat miskin.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

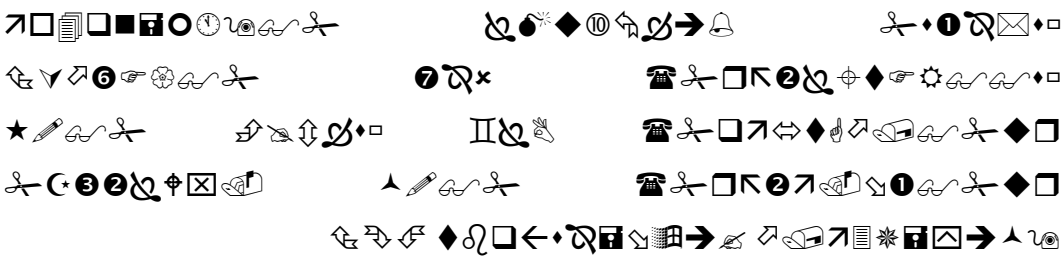
Masalah kemiskinan saat ini dirasakan sudah sangat mendesak untuk ditangani. Khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, dan mata pencaharian yang tidak menentu.

Kemiskinan adalah gambaran ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhanya sesuai dengan kehidupan yang layak, namun kemiskinan itu memiliki ciri yang berbeda antar wilayah. Perbedaan ini terkait pada kemiskinan sumber daya alam. Sumber daya manusia dan lembaga setempat. Kemiskinan tumbuh sebagai bagian dari masalah dalam kehidupan masyarakat, ini bukan hanya menjadi masalah individu dalam suatu Negara tetapi menjadi masalah bangsa dalam rangka globalisasi dan sudah menjadi masalah bangsa dalam rangka globalisasi dan sudah menjadi masalah besar, karena meningkatnya kemiskinan akan memicu terhadap kriminalitas suatu Negara atau daerah.

Memperhatikan akar kata *miskin* yang disebut di atas berarti diam atau tidak bergerak diperoleh kesan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan, atau tidak dapat bergerak dan berusaha. Keengganan berusaha adalah penganiayaan terhadap diri sendiri.

Allah SWT melalui Firman-Nya menegaskan kepada umat manusia untuk tidak bersikap malas, sebaliknya Allah SWT senantiasa memerintahkan hamba-Nya untuk senantiasa bekerja dan berusaha untuk memperoleh rezeki dan anugerah dari-Nya.

Didalam al-Quran ditegaskan:



Artinya: *Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.* (QS. Al-Jumuah (62):10).

Sejak krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga sekarang, kemiskinan dan kesenjangan sosial disebuah Negara kaya dengan sumberdaya alam dan mayoritas penduduknya beragama islam, seperti Indonesia sangat memprihatinkan, jumlah penduduk miskin terus bertambah jumlahnya.

Bukti-bukti empiris pertambahan jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan bukanlah karena persoalan kekayaan alam yang yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk, akan tetapi karena persoalan distribusi yang

kurang baik serta rendahnya rasa kesetiakawanan diantara sesama anggota masyarakat.[1]

Usaha-usaha pemberdayaan manusia agar terbebas dari belenggu kemiskinan sudah lama dirintis Pemerintah Indonesia, pemerintah telah melaksanakan beberapa program pengentasan kemiskinan selama krisis tahun 1998-1999 diantaranya[2] :

1. Program pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi dampak krisis (PDM-DKE)
2. Program pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan prasarana (PPM- Prasarana).
3. Program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP).
4. Program pengembanganekonomi masyarakat daerah (P2KER).
5. Program tabungan keluarga sejahtera (Takesra) dan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (KUKESRA).

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah suatu lembaga milik masyarakat yang representatif, mengakar dan dapat dipercaya yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Dalam pelaksanaan tugasnya untuk menanggulangi masalah kemiskinan warganya, BKM melalui pendekatan TRIDAYA diharapkan mampu mengakses sumber-sumber daya yang tersedia yang mencakup tiga aspek yaitu lingkungan

[1]Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, Teras, Depok Sleman Yogyakarta, 2011, hal, 46-47.

[2]Sri Adiningsih, dkk,*Satu Dekade Pasca-Krisis Indonesia : Badai Pasti Berlalu?*, KANISUS (Anggota IKAPI), Yogyakarta , 2008, Hal, 166-168

seperti pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman baik masyarakat umum atau kepentingan masyarakat miskin. Ekonomi seperti usaha produktif pengembangan modal ekonomi keluarga, yang bermanfaat langsung bagi perbaikan pendapatan keluarga miskin. Sosial, penyantunan kepada warga yang sangat miskin seperti, jompo, anak yatim piatu, korban bencana alam, anak putus sekolah karena alasan ekonomi, beasiswa bagi warga miskin

Kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman jauh dibawah standar kelayakan dan mata pencaharian yang tidak menentu. Kondisi ini memerlukan perbaikan disegala sektor kehidupan masyarakat melalui program ini kita berharap, sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan masyarakat cepat terealisasi.

Karena program ini memang salah satu upaya percepatan pembangunan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam mengurangi angka kemiskinan di perkotaan kelurahan Ladang Cakiah dengan dana Rp 205 juta akan mengalokasikan Rp 183,25 juta untuk 7 kegiatan lingkungan termasuk rehab rumah 4 unit, pembangunan 1 unit posyandu, kegiatan sosial Rp 9,25 juta dan biaya operasional Rp 12,5 juta.Semua kegiatan yang telah direncanakan ini, dalam pelaksanaan nantinya akan dikelola oleh masing-masing Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan didampingi fasilatator kelurahan (faskel), Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dan Unit Pengelola Sosial (UPS) yang ada disetiap kelurahan.

Apakah sudah bisa dikatakan bahwa pelaksanaan Badan Keswadayaan Masyarakat tersebut sudah efektif dalam menanggulangi kemiskinan. Seperti kenyataanya masih banyak masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kesimpangsiuran dalam penyaluran dana kepada masyarakat. Kurang bijaksananya BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang diberi pinjaman merasa leluasa terhadap pinjaman itu dan tidak memanfaatkan dana sesuai dengan usulan peminjaman, yang seharusnya mendapatkan pinjaman tetapi tidak mendapatkan, seharusnya digunakan untuk modal usaha tetapi digunakan untuk hal yang lain. Hal ini akan menimbulkan ketidakefektifan dan pelaksanaan P2KP di Kelurahan Ladang Cakiah Aur Birugo Tigo Baleh. Hal ini ditunjang dengan kondisi masyarakat miskin Kelurahan Ladang Cakiah tahun 2016 dengan jumlah penduduk 2004 jiwa, 554 Kepala Keluarga dan jumlah penduduk miskin di Kelurahan Ladang Cakiah berjumlah 310 jiwa, 68 Kepala Keluarga.[3]

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini lebih lanjut dalam sebuah skrips berjudul "**Analisis program Penaggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Ladang Cakiah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi.**

B. Identifikasi Masalah

[3] Daryeni, Kasi Agama dan Sosbud Kelurahan Ladang Cakiah, (*Wawancara Pribadi),* 3 Mei, Pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan maka dapat diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih banyak masyarakat Kelurahan Ladang Cakiah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh yang tergolong masyarakat rumah tangga miskin.
2. Kualitas lingkungan perumahan jauh dibawah standar kelayakan.
3. Masih belum meratanya dalam memberikan pembiayaan dana untuk modal usaha, dan dalam penggunaan dana oleh warga miskin.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan dan begitu luasnya masalah serta disebabkan oleh keterbatasan waktu dan biaya maka penulisan karya ilmiah ini dibatasi dan hanya berkaitan dengan Analisis Program Penanggulangan Kemisknan Perkotaan (P2KP) dilihat dari perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Ladang Cakiah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, khususnya program Ekonomi

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

a. Bagaimanakah Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam, (Studi Kasus Kelurahan Ladang Cakiah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh). Khususnya pada Program Ekonomi yaitu pembiayaan modal usaha.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diungkapkan diatas maka penelitian mempunyai kegunaan seperti :

a. Kegunaan Teoritis

   Penulis berharap dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang pemahaman program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) dilihat dari perspektif Ekonomi Islam.

b. Kegunaan Praktis

   1) Bagi penulis, untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Falkutas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam di IAIN Bukittinggi.
   2) Bagi akademis, semoga hasilpenelitian inidapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi ilmu pengetahuan.

3) Bagi masyarakat, untuk memperdalam pengetahuan terhadap program penanggulagan kemiskinan perkotaan (P2KP) dilihat dari perspektif Ekonomi Islam.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penulisan skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa kata yang terdapat dalam judul sebagai berikut:

Analisis : Penguraian suatu pokok atas berbagai bagianya itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.[4]

Kemiskinan : Lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, seperti pangan, pakaian, papan sebagai tempat berteduh.[5]

P2KP : Merupakansalah satu proyek nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menanggulangi berbagai persoalan kemiskinan yang terjadi di masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan (urban).

[4] Departemen Pendidikan Nasional , Kamus Besar Bahasa ndonesia, balai Pustaka, Jakarta, 2007, hal, 43.

[5] Hartomo dan Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hal, 314

Perspektif : Pandangan atau anggapan.

Ekonomi Islam: Pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat[6]

Dari penjelasan judul diatas dapat diambil kesimpulan yaitu : Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) berbasis pemberdayaan masyarakat dan menanggulangi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dan layak dilihat dari pandangan ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh yang jelas mengenai penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ini, yaitu :

BAB I : **PENDAHULUAN** yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan judul dan sistematika penulisan.

[6] Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*, Rajawali PersJakarta, 2015) hal. 3.

BAB II **: LANDASAN TEORI.** Bab ini menyajikan landasan umum tentang kemiskinan dan landasan syariah tentang kemskinan, kebijakan dalam penggunaa dana, pembiayaan, pendistribusian pendapatan dalam Islam dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan kajian terdahulu.

BAB III **: METODE PENELITIAN.** Pada bab ini memaparkan dan menguraikan tentang metodologi penelitian yang meliputi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpilan data dan analisa data.

BAB IV **: HASIL PENELITIAN.** Pada bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian yang berisikan monografi kelurahan Ladang Cakiah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Analisis Program Penanggulanggan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), ketentuan pembiayaan modal usaha kepada warga miskin dilihat dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Ladang Cakiah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh.

BAB V **: PENUTUP.** Pada bab ini disampaikan kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Umum Tentang Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Menurut Sar A levitan mengemukakan tentang kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak.[7]

Dr. Suntoyo Usman menambahkan konsep kemiskinan, umumnya lebih dekat kepada kemiskinan subyektif, konsep ini dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok atau orang yang miskin itu sendiri, kelompok yang menurut ukuran kita miskin, namun menurut perasaanya tidak miskin, atau kelompok yang menurut standar hidup layak, tetapi perasaanya mengatakan layak demikian pula sebaliknya. Konsep ini dianggap paling layak untuk memahami kemiskinan dan merumuskan strategi untuk mengatasinya.[8]

Emil Salim (1982) menyatakan bahwa yang berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup

[7] Andre Bayo Ala, (Editor), *kemiskinan dan Strategi Memerangi kemiskinan*, Liberti,Yogyakarta,1981), hal 3.

[8] Muhammad Ridwan, *manajemen baitul maal wa tamwil BMT*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hal. 5-6

yang paling pokok, seperti pangan, papan, pakaian, tempat berteduh mereka itulah dikatakan miskin.[9]

2. Gejala-gejala Kemiskinan

Tidaklah mungkin sama sekali dengan hati tenang menyaksikan petunjuk statistic yang tercemin dalam laporan pembangunan dunia 1978 dari Bank Dunia pada tahun 2000 penduduk yang benar-benar miskin dunia akan berjumlah 600 – 540 juta diantaranya hidup di negeri-negeri yang berpendapatan rendah.[10]

Dalam kehidupan sehari-hari dimensi-dimensi dari gejala – gejala kemiskinan muncul dalam berbagai bentuknya, seperti antara lain:

a) Dimensi politik

Sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya wadah / organisai yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat mskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting tang menyangkut diri mereka. Akibatnya mereka juga tidak memilk akses yang memadai ke berbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak, termasuk akses informasi.

b) Dimensi sosial

[9] Hartomo dan Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar,* Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hal, 314.
[10] Soedjatmoko,*Pembangunan dan Kebebasan*, LP3ES , Jakarta, 1984, hal, 43.

Sering muncul dalam bentuk tidak terintegrasikannya warga miskin kedalam institusi sosial yang ada, terinternalisasikannya budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka, serta pudarnyan nilai-nilai kapital sosial.

c) Dimensi ekonomi

Muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak.[11]

B. Landasan Syariah Terhadap Kemiskinan

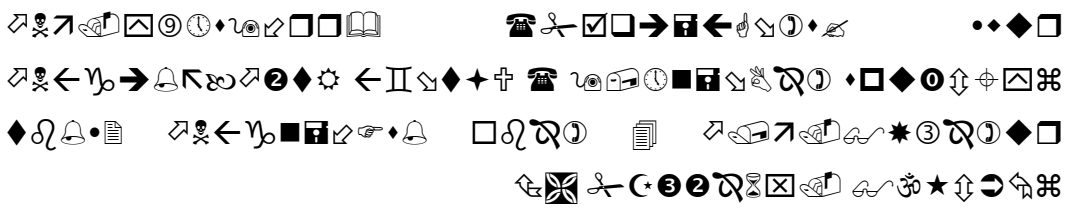
1. Pengertian Kemiskinan

Miskin diartikan tidak berharta benda, serba kekurangan (berpenghasilan rendah). Dalam arti luas kemiskinan tidak saja berkaitan dengan rendahnya tingkat kepemilikan harta benda, tetapi juga berhubungan dengan terbatasnya berbagai potensi diluar harta bendaan, seperti miskin pengetahuan, miskin kekuasaan, dan miskin kasih sayang, sedangkan *fakir* mempunyai arti orang yang sangat berkekurangan, orang yang sangat miskin, orang yang sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin.

Dalam konsepIslam, kemiskinan dianggap mendekati kekufuran, Islam memandang bahwa kemiskinan dan kebodohan merupakan penyakit kronis umat Islam yang harus dilawan. Tekanan kemiskinan kadang- kadang mengalahkan moral seseorang, akibat dari kemiskinan ini orang tua rela mengorbankan buah

[11] Direktoral Jendral Cipta Karya Departement Pekerjaan Umum P2KP-3 ,(SKPP2KP),Jakarta 2005, hal 1.

hatinya akibat lilitan kemiskinan atau takut akan kemiskinan, sehingga dengan keras Al- Quran menentang tindakan ini dengan mengancam pelakunya dengan hukuman berat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al- Isra': 31



Artinya: "*dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar".*

Jelaslah, Islam mengakui adanya dampak ekonomi terhadap perilaku manusia kadang-kadang factor ekonomi mengalahkan dorongan fitrah manusia, disamping itu banyak lagi factor yang berpengaruh terhadap perilaku manusia, diantaranya agama, akhlak, moral dan sosial bahkan mendorong seseorang untuk membunuh anaknya sendiri.Karena itu, islam menganggap kemiskinan itu sebagai ancaman yang biasa dihembuskan oleh setan.

Menurut Wahbah al Zuhayli, tokoh fikih dari Syiria, mengatakan bahwa orang miskin ialah orang yang punya usaha dan mampu mengelolanya akan tetapi penghasilanya tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar minimalnya, sehingga ia tinggal di rumah yang tidak layak huni, atau makananya tidak layak saji, atau sandang tidak layak pakai sesuai dengan perubahan iklimnya. Jika

dpresentasikanorang miskin mampu menghasilkan dibawah 50% sampai 75% dari kebutuhan pokonya[12]

Dalam pandangan madzhab Hanafi orang miskin adalah adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apapun, memilki harta kurang dari nishab zakat yakni dibawah 200 dirham[13]

Ada beberapa sebab tejadinya kekafiran dan kemiskinan ini, di antaranya karena tidak punya pekerjaan sama sekali sehingga ia menggangur atau ada pekerjaan namun penghasilannya masih jauh dari mencukupi kebutuhan dasarnya. Atau ada lowongan pekerjaan yang layak dan menjanjikan, tetapi ia tidak memilki kualifikasi yang sesuai dengan pekerjaan itu, seperti orang cacat fisik atau mental sehingga tidak berdaya kerja. Biasanya orang seperti ini banyak ditemui di kota-kota dengan profesi meminta-minta.[14]

2. Jenis- Jenis Kemiskinan

a. Kemiskinan Natural (Alamiah)

Yakni kemiskinan yang terjadi karena factor alam, yakni asalnya memang miskin. Kelompok miskin karena mereka memang tidak memiliki sumber daya ekonomi yang memadai, baik sumber daya alam, manusia maupun sumber daya ekonomi lainya, sehingga mereka tidak bisa ikut secara penuh dalam proses

[12] A. Rahman Ritongga,*Memaknai Mustahik Zakat Dalam Konteks Kekinian*,Hayfa Press, Padang Cet KE-1 2013, hal.6.

[13] Abdullah Nashid Ulwan, *Zakat Menurut 4 Madzhab* ,Al- Kautsar, Jakarta, 2008 , hal, 39.

[14] A. Rahman Ritongga, *Memaknai Mustahik Zakat Dalam Konteks Kekinian, ……..…* hal 6

pembangunan, kalau pun ikut mungkin mendapatkan imbalan yang rendah, misalnya karena cacat tubuh bawaan lahir.

b. Kemiskinan Kultural (Budaya)

Terjadi karena adanya pengaruh budaya, adat istiadat, kebiasaan hidup serta gaya hidup. Ada sekelompok masyarakat yang beranggapan salah terhadap takdir.Mereka sudah merasa cukup dengan kondisi kemiskinanya, karena kemiskinan sudah menjadi suratan takdir, sehingga tidak perlu diubah.Kelompok masyarakat ini sangat sulit untuk diajak berpatisipasi dalam pembangunan.Tidak mudah untuk melakukan perubahan dan perkembangan, tidak ada upaya untuk memperbaiki nasibnya menurut ukuran kemiskinan baik absolut maupun relative, sesungguhnya mereka termasuk miskin tatapi tidak merasa miskin dan tidak mau disebut miskin, jadi belum ada ukuran kemiskinan yang mampu menjangkaunya.

c. Kemiskinan Struktural (Politik)

Terjadi karena adanya ketimpangan dalam pembangunan baik antar sektor, antar golongan maupun antar daerah. Ketidakmerataan penduduk serta ketersediaan sumber daya ekonomi yang memadai membuat ketimpangan pendapatan. Kebijaksanaan pemerintah yang sangat sentralistik pada masa orde baru membuat pertumbuhan ekonomi hanya terpusat diperkotaan .

3. Bahaya dari Kemiskinan

Kemiskinan menurut Islam suatu kondisi yang harus diberantas atau masyarakat miskin harus diberdayakan supaya lebih baik kehidupanya. Meskipun miskin itu sunnatullah sebagaimana kaya juga *sunnatullah*, maka upaya mengentaskan kemiskinan, berarti menuju sunnatullah yang lebih baik.Tidak dipungkiri, bahwa kemiskinan dapat berdampak negative bagi kehidupan dan kemiskinan berdampak negative juga bagi masyarakat, bangsa, bahkan agama.

a) Bahaya Kemiskinan Terhadap akidah (Agama)

Kemiskinan itu sangat membahayakan akidah, disamping menjadikan orang miskin berprasangka buruk (*su"dzan)* kepada Allah SWT serta sunatullah, kemiskinan juga rentan terhadap propaganda penukaran akidah. Sangat banyak dijumpai, bahwa karena kemiskinan seseorang menjual akidahnya dan berpindah agama. Karena kesombongan orang islam kaya, keengganan orang mampu untuk menolong sesama, umat islam lambat laun berkurang jumlahnya. Bahaya ini dapat saja diatasi bersama, kebersamaan, saling dukung dan kepedulian sesama akan mampu mengangkat kemiskinan, ini semua dibutuhkan kerja keras dan dukungan semua pihak.

b) Bahaya Kemiskinan Terhadap Moral

Disamping membahayakan akidah dan agama kemiskinan dapat merusak moral atau akhlak.Orang miskin dapat saja bertindak criminal, karena hidup ditengah-tengah orang kaya yang sombong.Kekecewaan hidup dan keputusasaan dapat mendorong nafsu jahatnya dan mengalahkan nuraninya. Badai kehidupan yang ganas tidak tidak mampu diimbangi dengan moral dan akhlak, akan semakin

fatal jika nafsu sudah menguasai jiwanya dan bersikap masa bodoh serta mengabaikan nilai-nilai moral dan akhlak.[15]

c) Kemiskinan Membahayakan Keluarga

Kemiskinan merupakan ancaman terhadap keluarga, baik dalam segi pembentukan, kelangsungan maupun keharmonisannya. Dari segi pembentukan keluarga, kemiskinan merupakan salah satu rintangan besar bagi para pemuda untuk melangsungkan perkawinan, disamping memenuhi syarat seperti mahar, nafkah dan kemandirian ekonomi. Sebab itulah Al-Quran menasehati mereka yang menghadapi kesulitan agar menjaga diri dan bersabar sampai kekuatan ekonominya memungkinkan.

Firman Alla SWT dalam QS. An-Nur : 33



Artinya *: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.*

4. Cara Mengentaskan Kemiskinan Dalam Islam

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, Al-Quran menganjurkan banyak cara yang harus ditempuh, yang secara garis besar dapatdibagi pada tiga hal pokok yaitu :

[15] Muhammad, Ridwan *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil,* UII Press , Yogyakarta, 2004 hal.22.

a. Kewajiban terhadap setiap individu tercermin dalam kewajiban bekerja dan berusaha.Kerja dan usaha merupakan cara pertama dan utama yang ditekankan oleh Kitab Suci Al-Quran, karena hal inilah yang sejalan dengan naluri manusia, sekaligus juga merupakan kehormatan dan harga dirinya.

Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah-nya, menjelaskan bagaimana naluri kepemilikan itu kemudian mendorong manusia bekerja dan berusaha. Hasil kerja tersebut apabila mencukupi kebutuhannya dalam istilah agama disebut rizki (rezeki), dan bila melebihinya disebut kasb (hasil usaha).

Kalau demikian kerja dan usaha merupakan dasar utama dalam memperoleh kecukupan dan kelebihan. Sedang mengharapkan usaha orang lain untuk keperluan itu, lahir dari adat kebiasaan dandi luar naluri manusia. Memang, lanjut Ibnu Khaldun, kebiasaan dapat membawa manusia jauh dari hakikat kemanusiaannya.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa jalan pertama dan utama yang diajarkan Al-Quran untuk pengentasan kemiskinan adalah kerja dan usaha yang diwajibkannya atas setiap individu yang mampu. Puluhan ayat yang memerintahkan dan mengisyaratkan kemuliaan bekerja. Segala pekerjaan dan usaha halal dipujinya, sedangkan segala bentuk pengangguran dikecam dan dicelanya.

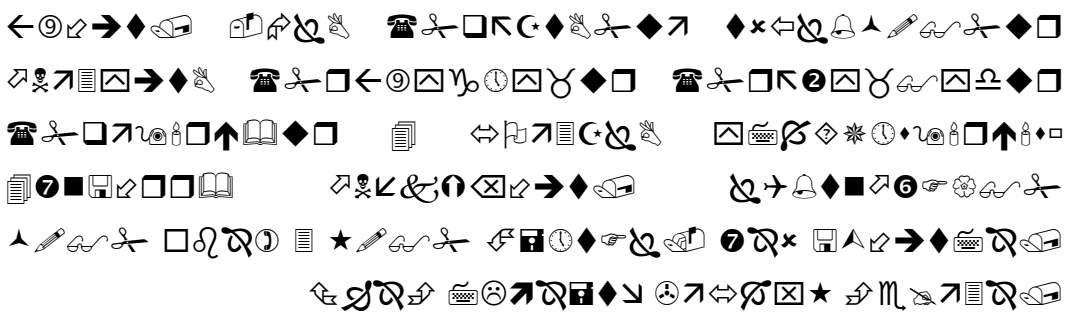
b. Kewajiban orang lain tercermin pada jaminan satu rumpun keluarga, dan jaminan sosial dalam bentuk zakat dan sedekah wajib.

1. Jaminan satu rumpun keluarga

Boleh jadi karena satu dan lain hal seseorang tidak mampu memperoleh kecukupan untuk kebutuhan pokoknya, maka dalam halini Al-Quran datang dengan konsep kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, atau dengan istilah lain jaminan antar satu rumpun keluarga sehingga setiap keluarga harus saling menjamin

dan mencukupi.

Firman Allah SWT dalam QS.Al- Anfal ayat 75.



Artinya : dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat).

Ayat ini menggaris bawahi adanya hak bagi keluarga yang tidak mampu terhadap yang mampu. Dalam mazhab Abu Hanifah memberinafkah kepada anak dan cucu, atau ayah dan datuk merupakan kewajiban walaupun mereka bukan muslim.

2. Zakat

Dari sekumpulan ayat-ayat Al-Quran dapat disimpulkan bahwakewajiban zakat dan kewajiban-kewajiban keuangan lainnya, ditetapkan Allah berdasarkan pemilikan-Nya yang mutlak atassegala sesuatu, dan juga

berdasarkan istikhlaf (penugasan manusia sebagai khalifah) dan persaudaraan semasyarakat, sebangsa, dan sekemanusiaan.

Apa yang berada dalam genggaman tangan seseorang atausekelompok orang, pada hakikatnya adalah milik Allah. Manusia diwajibkan menyerahkan kadar tertentu dari kekayaannya untuk kepentingan saudara-saudara mereka.

c. Kewajiban Pemerintah

Pemerintah juga berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga negara, melalui sumber-sumber dana yang sah. Yang terpenting di antaranya adalah pajak, baik dalam bentuk pajak perorangan, tanah, atau perdagangan, maupun pajak tambahan lainnya yang ditetapkan pemerintah bila sumber-sumber tersebut di atas belum mencukupi.[16]

5. Pandangan Islam Mengenai Kemiskinan

Islam menghendaki kemakmuran bagi umatnya, yang tidak hanya didapatkan dari hasil kerja keras sendiri melainkan ada campur tangan Tuhan didalamnya. Dalam Islam cara mencari harta serta menganjurkan kepada pemiliknya untuk berusaha membantu sesama sudah ada aturanya, sehingga Islam menolak paham-paham ekstrim terhadap kemiskinan.

a. Islam Menolak Paham yang Mensucikan Diri

Didalam Islam tidak dibenarkan mensucikan kemiskinan, tetapi juga kepada paham *zuhud* yang telah terpengaruh dengan budaya dari luar Islam. Yang

[16]Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an, di akses dari http:// Media Isnet. Org/Islam/Quraish/wawasan/ Miskin/Html, di akses pada tanggal 30 Mei 2016 , pukul 12 : 00.

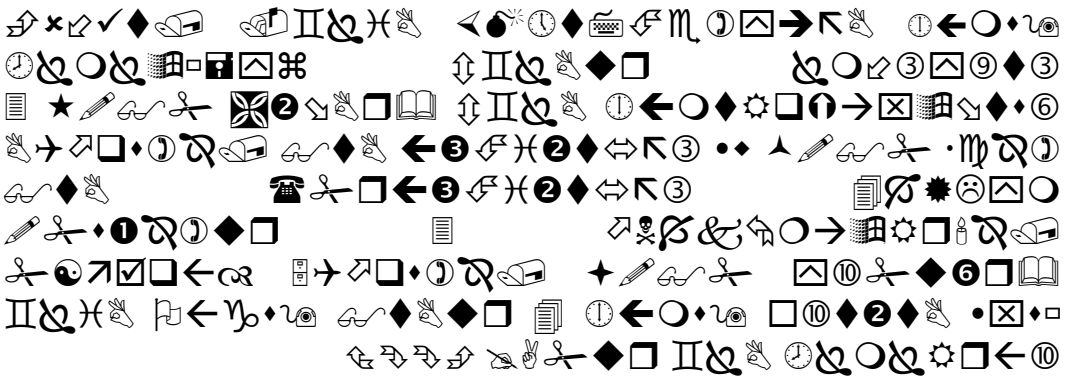
mana tidak ada satu pun ayat *Al-Qur'an* atau hadis Nabi membahas tentang mensucikan kemiskinan.

b. Penolakan Pandangan Jabbariyah (Totalitas)

Pandangan ini ditolak karena mengarah pada kepasrahan total, kemiskinan sudah menjadi takdir dan tidak satu pun orang dapat merubahnya. Jika Allah menghendaki kaya, maka kemiskinan akan hilang dengan sendirinya. Pandangan ini menganggap bahwa manusia tidak perlu bersusah payah untuk mengubah nasibnya, karena nasib setiap manusia itu sudah ditentukan.

Islam menolak pandangan ini karena didasari oleh argumentasi bahwa setiap orang tidak tahu nasibnya dikemudian hari, sehingga manusia masih bisa berusaha, berkerja keras, merencanakan kehidupan dan mencapainya

Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Ra'du:



Artinya: *Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*

Dari penjelasan ayat diatas jelaslah bahwa Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga merka merubah keadaan yang ada pada diri

sendiri, harus selalu berusaha untuk merubah kehidupan kearah yang lebih baikdan tidak pasrah begitu saja menerima nasib tetapi berusaha keras untuk merubahnya.

c. Islam Menolak Paham yang Menggantungkan pada Kesalehan Pribadi dan Sedekah Suka Rela

Paham ini, Islam hanya membenarkan dari sisi anjuranya. Islam memang menganjurkan untuk membantu sesama, menyantuni fakir-miskin, memelihara anak yatim, tetapi Islam menolak dari segi motivasinya, karena dalam pandangan ini menolong semata-mata karena keinsafan atau kesadaran individu. Tidak ada ukuran yang jelas, tidak ada batas minimum kewajiban, serta tidak ada ketegasan tanggung jawab orang yang ditolong.

Pandangan ini dalam penilaian Islam tidak banyak membawa kemajuan, bahkan sebaliknya yang terjadi, yaitu orang miskin selalu bergantung dari belas kasihan orang kaya akan menjadi lebih parah jika orang kaya berhati batu, karena rasa belas kasihan mudah dikalahkan oleh nafsu serakah dan tamak akan harta, akibatnya orang miskin terus menderita.

Islam menolak pandangan ini didasari oleh, pertama bahwa zakat adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat. Ada batas dan jumlah minimum harta yang wajib dizakati, kedua dalam merumuskan kebijakan yang memihak kepada yang masih miskin dan lemah dan Negara memiliki peran dalm hal ini.[17]

C. Kebijakan dalam Penggunaan Dana dalam Islam

[17] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil BMT*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hal. 11-14.

Jika pelaku usaha menggunakan dana dari pemilik dana dia diberikan amanah untuk itu, maka harus dipertanggungjawabkan atas penggunaan dana ini secara baik dan benar. Iplementasi pelaksanaan dari penggunaan dana secara amanah, dapat dilakukan dengan beberapa kentetuan dan persyaratan tertentu yang telah disepakati sebagai berikut :

1) Sesuai dengan kesepakatan semula dari maksud dan tujuan dana digunakan
2) Adanya proses transparansi dari penggunaan dan hasil prestasi dicapai.
3) Pembagian hasil yang disepakati bersama secara adil.
4) Tidak digunakan untuk membiayai bisnis terlarang menurut syariah, seperti bisnis perjudian (spekulasi), bisnis barang atau jasa maksiat.[18]

D. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu perbuatan untuk membiayai baik perorangan maupun perusahaan, setiap penerimaan harus dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya, penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui bank, koperasi, danlembaga keuanganbukan bank, untuk memperkuat permodalan usaha mikro, kecil dan menengah.[19]

Pembiayaan dalam prakteknya, yaitu:[20]

[18] Muslich, M.M, *Bisnis Syariah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen,* Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, 2007, hal, 185.

[19] Ahmad Muliadi, *Hukum Lembaga Pembiayaan,* Akademia Permata, Jakarta Barat, 2013, hal, 3-4

[20] Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithal, *Kredit Management Hand Book,* PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hal, 5.

a. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan

kembali nilai ekonomi yang sama dikemudian hari.

b. Suatu tindakan atas dasar perjanjian dimana didalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.

c. Suatu hak, yang dengan hak tersebut seseorang dapat mempergunakanya untuk tujuan tertentu dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.

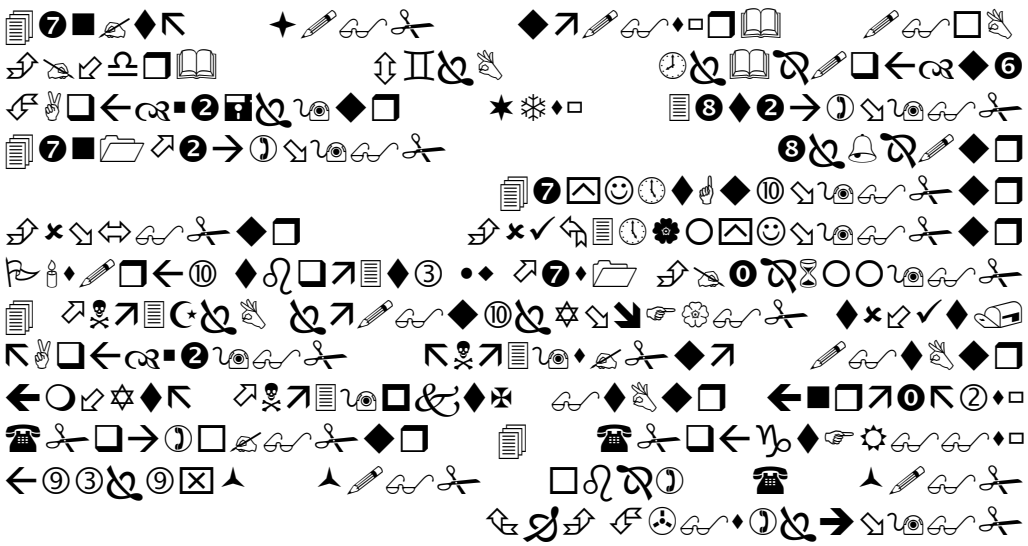
E. Distribusi Pendapatan Dalam Islam

Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi ataupun umum (public) kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat.

Islam memberikan batas-batas tertentu dalam berusaha, memiliki kekayaan, dan mentransaksikanya. Dalam pendistribusian harta kekayaan, Al-Qur'an telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif, seperti memperkenalkan hukum waris yang memberikan batas kekuasaan bagi pemilik harta kekayaan kepada semua karib kerabat apabila seseorang meninggal dunia.[21]

Firman Allah SWT dalam Sura Al- Hasr ayat 7

[21] Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, PT Raja Grafindo, 2015, Jakarta hal, 131-132.



Artinya : *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.*

Dalam Al-Qur'an berulang kali berulang kali mengingatkan agar kaum muslim tidak menyimpan dan menimbun kekayaan untuk kepentingan mereka sendiri, tatapi mereka harus memenuhi kewajiban terhadap keluarga, tetangga, dan orang-orang harus mendapat bantuan.[22]

F.Program Penanggulangan Kemiskinan (P2KP)

P2KP adalah singkatan dari Program Penanggulangan Kemiskinan diPerkotaan.P2KP merupakan salah satu program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menanggulangi berbagai persoalan kemiskinan yang terjadi di masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal

[22] Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, PT Raja Grafindo, 2015, Jakarta hal, 133.

di wilayah perkotaan (urban). Pemerintah Indonesia selanjutnya menugaskan Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Kimpraswil (sekarang Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum), sebagai pelaksana dari program dari P2KP.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun "gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.[23]

1. Visi dan Misi Dari P2KP

Visi P2KP : Terwujudnya masyarakat madani, yang berbudaya maju, mandiri, dan sejahtera dalam lingkungan permukiman sehat, produktif, dan lestari. **Misi P2KP :** Membangun masyarakat mandiri yang mampu menjalin kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah maupun kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif dan terciptanya lingkungan sehat, produktif tertata dan berkelanjutan.[24]

2. Tujuan Pemberian Pembiayaan Oleh P2KP

[23] Kusuma, Sonny, 2006, P2KP-Urban Poverty Project, Http:// P2KP-Urban Poverty. Blogspot.com, 6 mei 2016, pukul : 20.00 WIB.

[24]Direktoral Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum,Pedoman Umum P2KP-3,(SKSP2KP, Jakarta 2005), hal, 6.

Penanggulangan kemiskinan melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi yang dikenal dengan Tridaya. Dalam

kegiatan ekonomi, diwujudkan dengan kegiatan pinjaman bergulir, yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa dimana BKM/UPK berada dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Pedoman ini hanya mengatur ketentuan pokok untuk pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir, namun keputusan untuk melaksanakannya diserahkan sepenuhnya kepada warga masyarakat setempat, dengan pemberian Panduan Operasional serta petunjuk pembukuan untuk UPK, Beberapa pertimbangan dalam melanjutkan pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan antara lain :

a. Tersedianya akses dan jasa layanan keuangan yang berkelanjutan telah terbukti merupakan salah satu alat efektif untuk membantu rumah tanggamiskin meningkatkan pendapatan dan kekayaannya.
b. Akses rumah tangga miskin ke jasa layanan keuangan formal masih sangat rendah. Sekitar 29 juta rumah tangga miskin masih belum mendapat akses kejasa layanan keuangan formal.
c. Pinjaman bergulir Program penanggulangan Kemiskinan Perkotaan memiliki peluang dapat menjangkau sekitar 2,5 juta rumah tangga miskin yang sama sekali belum menerima akses ke lembaga keuangan.

d. Permintaan pinjaman bergulir pada rencana pembangunan masyarakat masih tinggi.

e. Pemutusan pendampingan yang telah berjalan selama ini bila tanpa disertai kinerja yang memadai akan merusak budaya meminjam dan jaminan sosial yang ada di masyarakat.[25]

Pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar. Meskipun demikian, P2KP bukanlah program keuangan mikro, dan tidak akan pernah menjadi lembaga keuangan mikro. Program keuangan mikro bukan hanya pemberian pinjaman saja akan tetapi banyak jasa keuangan lainnya yang perlu disediakan. Peran P2KP hanya membangun dasar-dasar solusi yang berkelanjutan untuk jasa pinjaman dan non pinjaman di tingkat kelurahan.

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dijadikan momen untuk tahap konsolidasi kegiatan keuangan mikro. Oleh sebab itu, dalam tahap ini perlu diciptakan Unit Pengelola Keuangan (UPK)yang kuat, sehat dan secara operasional terpisah dari BKM. Masyarakat sendiri harus terlibat dalam keputusan untuk menentukan masa depan UPK.

G. Kajian Terdahulu

[25] Kusuma, Sonny, 2006, P2KP-Urban Poverty Project, Http:// P2KP-Urban Poverty. Blogspot.com, 6 mei 2016, pukul : 20.00 WIB.

Berdasarkan tinjauan kepustakaan yang dilakukan, maka ditemukan tulisan yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan kali ini. Penelitian yang ditulis oleh:

Rina Elvita SEI, " Upaya program penanggulangan kemiskinan berbasis masjid (PPKBM) dalam peningkatan ekonomi masyarakat miskin". Masalah pokok yang muncul dan yang diselesaikan dalam penelitian tersebut adalah upaya program penanggulangan kemiskinan berbasis masjid (PPKBM) dalam peningkatan ekonomi masyarakat miskin di Jorong Bingkudu Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari upaya yang dilakukan oleh PPKBM kebanyakan yang menerima bantuan adalah masyarakat ekonomi menengah atau masyarakat yang tergolong mampu untuk memenuhi kebutuhanya dan ada peningkatan pendapatan dari awal pelaksanaan PPKBM sampai sekarang yaitu dari tahun 2010 ke tahun 2011 adalah 13,92%, tahun 2012 adalah 10,80%, tahun 2013 adalah 9,72% dan 2014 5,29%[26].

Pada penelitian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya teliti, yang mana penelitian diatas mengkaji tentang Upaya program penanggulangan kemiskinan berbasis masjid (PPKBM) dalam peningkatan ekonomi masyarakat miskin, sedangkan penulis mengkaji tentang bagaimanakah program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) dilihat dari perspektif Ekonomi Islam.

[26]Rina, Elvita,Upaya program penanggulangan kemiskinan berbasis masjid (PPKBM) dalam peningkatan ekonomi masyarakat miskin Jorong Bingkudu Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang , 2015 (Tidak diterbitkan), hal 84.

Novia Ade Irma Suryani " analisis peran PKPU dalam mengentaskan kemiskinan melalui penyaluran zakat di Kecamatan Aur Tajungkang Sawah Kelurahan Tangah Sawah masalah pokok yang diselesaikan dalam penelitian tersebut adalah tidak semua masyarakat miskin yang ada di kelurahan tangah sawah dapat ditangani oleh PKPU, namun PKPU disni hanya membantu masyarakat yang benar-benar layak untuk menerima bantuan melalui survey lapangan[27].

Pada penelitian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya teliti, yang mana penelitian diatas mengkaji tentang analisis peran PKPU dalam mengentaskan kemiskinan melalui penyaluran zakat di Kecamatan Aur Tajungkang Sawah Kelurahan Tangah Sawah sedangkan penulis mengkaji tentang bagaimanakah program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) dilihat dari perspektif Ekonomi Islam.

Hartati " partisipasi masyarakat dan efektifitas PNPM Dalam Rangka Menanggulangi Kemiskinan di Malalak Selatan" yang membahas tentang efektifitas PNPM dalam menanggulangi tingkat kemiskinan yang terjadi di Malalak Selatan adalah:

a) Partisipasi masyarakat masih kurang dalam melakukan kegiatan PNPM Mandiri, yang terlihat dari keterlambatan anggota pembiayaan dalam mengembalikan dana pinjaman.

[27]Novia Ade Irma Suryani" analisis peran PKPU dalam mengentaskan kemiskinan melalui penyaluran zakat di Kecamatan Aur Tajungkang Sawah Kelurahan Tangah Sawah 2014,, (tidak diterbitkan), hal, 78

b) Pelaksanaan PNPM Mandiri dalam menanggulangi kemiskinan sudah dapat dikatakan efektif , karena terjadinya penurunan masyarakat miskin di Malalak Selatan[28].

Pada penelitian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya teliti, yang mana penelitian diatas mengkaji tentang partisipasi masyarakat dan efektifitas PNPM Dalam Rangka Menanggulangi Kemiskinan di Malalak Selatan, sedangkan penulis mengkaji tentang bagaimanakah program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) dilihat dari perspektif Ekonomi Islam.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1) Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diambil adalah kualitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan (*field resourch).* Pendekatan yang dilakukan adalah penelitian kualitatif

[28]Hartati,Partisipasi Masyarakat dan Efektifitas Pelaksanaan PNPM Mandiri Dalam Rangka Menanggulangi Kemiskinan Di Malalak Selatan, 2014 (tidak diterbitkan), hal 70.

yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menelaah kausalitas antar variable yang menjelaskan sesuatu fenomena tertentu.[29]

2) Lokasi Dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Ladang Cakiah dan waktu penelitianya diawali dari bulan Mei sampai bulan Juni 2016

3) Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung kepada sumber tanpa melalui perantara dengan melakukan pertanyaan dan wawancara. Data primer yang penulis gunakan adalah hasil wawancara terhadap masyarakat miskin yang meneriama pembiayaan modal usaha di Ladang Cakiah kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung atas permasalahan yang dibahas, seperti yang diperoleh dari dokumen-dokumen, artikel-artikel dan buku-buku yang menyangkut tentang permasalahan yang penulis teliti dan sebagainya.

4) Teknik Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

[29]Zulganef, *Metode Penelitian Sosial & Bisnis,* Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, Hal, 11

Teknik pengumpulan data yang dilakukan, dengan jalan membaca, mempelajari dan menganalisa buku-buku, peraturan-peraturan, surat kabar, dan majalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan datayang digunakan untuk menghimpun data penelitian yang didapat dari hasil pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.[30]

Salah satu data yang dapat dilihat atau diambil dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu berupa data tentang jumlah penduduk, jumlah keluarga yang kurang mampu dan lain-lain. Data-data tersebut akan penulis peroleh pada kantor kelurahan Ladang Cakiah, hasil observasi ini berguna untuk menguatkan data yang diperoleh dari wawancara. Dalam melakukan observasi penulis secara langsung mengadakan pengamatan ke lokasi untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dalam mengentaskan kemiskinan di kelurahan Ladang Cakiah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh.

c. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.[31]

[30]Husein Usman dan Purnomo Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial,* PT Bumi Aksara, JJakarta, 2014, hal, 52

[31]Husein Usman dan Purnomo Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial,* PT Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal, 55

Penulis melakukan wawancara dengan masyarakat Ladang Cakiah dan pihak kelurahan Ladang Cakiah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data dan keterangan yang lebih mendalam mengenai Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari data-data tertulis dan catatan-catatan yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

6) Teknik Pengolahan Dan Analisa Data

Setelah data terkumpul, kemudian penulis mengolah data dengan menggunakan teknik analisa deskriptif, maksudya data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk angka bilangan atau statistic, melainkan tetap dalam bentuk penjelasan. Kemudian akan dianalisis dengan menggunakan analisa data kualitatif yang berhubungan dengan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan. Kelurahan Ladang Cakiah kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Data yang didapat peneliti akan dianalis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti suatu peristiwa yang terjadi, kemudian dari peristiwa tersebut dapat diketahui factor-faktor yang menimbulkan kejadian tersebut.[32] Analisa deskriptif dilakukan dengan menggunakan data kualitatif yang dikumpulkan dari hasil wawancara,

---

[32]Ratih Trisnawati, *Metodologi Penelitian Bisnis,* (Jakarta : Mitra Wacana Media,2007),hal.121.

pengamatan, dan telaah pustaka. Data yang muncul berupa data-data yang tertulis maupun dari lisan orang atau perilaku yang diamati dan diproses melalui catatan, kemudian disusun dalam teks diperluas. Data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan beraturan yang terdiri dari:

1. Pengumpulan data sekaligus reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih-milih hal yang pokok, memfokuskan hal-hal penting saja, setelah itu mendapatkan gambaran yang jelas.[33]
2. Penyajian data. Data yang direduksi disajikan dalam bentuk narasi.
3. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Kelurahan Ladang Cakiah

[33] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* Alfabeta, Bandung, 2014, hal, 92.

Kelurahan Ladang Cakiah Kota Bukittinggi terletak pada ketinggian antara 800-1.000 meter di atas permukaan laut, yang memiliki kondisi topografi yang beragam yaitu relatif datar.

Table 4.1

Batas Wilayah

Letak Batas	**Kelurahan**
Sebelah Utara	Kelurahan Koto Selayan
Sebelah Selatan	Kelurahan Kubu Tanjuung
Sebelah Timur	Kelurahan Parit Antang
Sebelah Barat	Kecamatan IV Angkek Canduang

Sumber : Profil Kelurahan Ladang Cakiah, 2015.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kelurahan Ladang Cakiah sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Koto Selayan, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kubu Tanjung, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Parit Antang dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan IV Angkek Canduang.

Kelurahan Ladang Cakiah merupakan salah satu Kelurahan dari Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi. Kelurahan Ladang Cakiah mempunyai jarak tempuh sekitar 1 kilo meter ke pusat kota Bukittinggi dengan waktu tempuh 15 menit.

B. Kondisi Umum Masyarakat Kelurahan Ladang Cakiah

1. Tingkat Pendidikan

Lembaga mempunyai perana penting terhadap kemajuan masyarakat suatu daerah apabila sarana pendidikan terpenuhi dengan baik dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dalam mencapai kemajuan akan lebih mudah apabila pendidikan tidak dapat mengiringi kemajuan zaman maka masyarakatnya pun akan terbelakang dari daerah yang memiliki pendidikan yang lebih bagus. Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita,ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Adapun fasilitas pendidikan yang tersedia di Keluran Ladang Cakiah Kecamatan Au Birugo Tigo Baleh terdiri dari .

Table 4.2
Sarana Pendidikan di Kelurahan Ladang Cakiah

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Paud	1 buah
2	Taman Kanak-Kanak	1 buah
3	Sekolah Dasar	1 buah
4	MDTA/TPA	2 buah

Sumber : Profil Kelurahan Ladang Cakiah, 2015

Dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan diharapkan dapat mengurangi jumlah angka kemiskinan, dengan adanya ilmu pengetahuan akan meningkatkan pengetahuan manusia baik dari ilmu pengetahuan maupun

teknologi ataupun dibidang lainya. Dengan ilmu pengetahuan akan menunjang kemajuan di Keluraha Ladang Cakiah .

2. Mata Pencaharian

Pertumbuhan perekonomian di Kelurahan Ladang Cakiah ini tergolong lambat dikarenakan mata pencaharian utama di Kelurahan Ladang Cakiah ini mengandalkan kepada pertanian dan industry, hanya sebagian kecil masyarakat Ladang Cakiah yang berfrofesi sebagai guru dan lainya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan P2KP Kelurahan Ladang Cakiah.

a) Prinsip dan Nilai Di P2KP

Mengingat bahwa Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah landasan dan pemicu tumbuhnya sinergi gerakan kemitraan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Perkotaan dari, oleh, dan untuk masyarakat, maka diperlukan prinsip dan nilai yang jelas sehingga dapat dipakai sebagai acuan perilaku dan arah bagi semua pelaku P2KP maupun bagi lembaga-lembaga masyarakat dalam mengembangkan program-program kemiskinan.

Namun prinsip-prinsip kemasyarakatan dan prinsip-prinsip pembangunan nilai-nilai yang melandasi pelaksanaan P2KP adalah nilai-nilai universal kemanusiaan. Prinsip yang harus dijunjung tinggi, ditumbuh kembangkan dan dilestarikan oleh semua pelaku P2KP adalah :

a. *Demokrasi* dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama kepentingan masyarakat miskin, maka mekanisme pengambilan keputusan dalam pelaksanaan P2KP dilakukan secara kolektif dan demokrasi.
b. *Partisipasi* yang dibangun dengan menekankan proses pengambilan keputusan oleh warga, mulai dari tataran ide/gagasan, perencanaan, pengorganisasian, pemupukan sumber daya, pelaksanaan hingga evaluasi dan pemeliharaan.
c. *Transparansi dan Akuntabilitas* masyarakat belajar dan melembagakan sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakan.

d. *Desentraalisasi* dalam proses pengambilan keputusan yang langsung menyangkut penghidupan dan kehidupan masyarakat agar dilakukan sedekat mungkin dengan pemanfaatan atau diserahkan kepada masyarakat itu sendiri.

Mengingat nilai-nilai universal kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi, ditumbuh kembangkan dan dilestarikan oleh semua pelaku P2KP dalam melaksanakan P2KP adalah :

a. Dapat dipercaya, bahwa semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan P2KP harus benar-benar dapat menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat maupun pemerintah untuk menerapkan aturan main P2KP dengan baik dan benar.
b. Ikhlas/kerelawanan, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan P2KP benar-benar berlandaskan niat ikhlas untuk turut memberikan kontribusi bagi penigkatan kesejahteraan masyarakat miskin yang ada di wilayahnya, dan tidak mengharapkan imbalan materi, jasa, maupun kepentingan kelompok.
c. Kejujuran, bahwa dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan dana serta pelaksanaan kegiatan P2KP harus dilakukan dengan jujur, sehingga tidak dibenarkan adanya upaya-upaya untuk merekayasa, memanipulasi maupun menutup-nutupi sesuatu.
d. Keadilan, bahwa dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan P2KP harus ditekankan asas keadilan *(fairness)* adanya kebutuhan nyata dan kepentingan masyarakat miskin.

e. Kesetaraan, bahwa dalam pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan pemanfaatan P2KP, tidak membeda-bedakan latar belakang, asal usul, agama, status maupun jenis kelamin dan lain sebagainya.
f. Kebersamaan dan keragaman, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan P2KP perlu dioptimalkan gerakan masyarakat melalui kebersamaan dan kesatuan masyarakat sehingga kemiskinan benar-benar menjadi urusan semua warga masyarakat dari berbagai latar belakang, suku, agama, mata pencaharian dan sebagainya.[34]

Dalam memberdayakan pelaku-pelaku pembangunan strategis dan masyarakat agar mampu membangun dan menanggulangi kemiskinan secara mandiri, maka strategi yang diambil P2KP dapat melalui :

a. Membangun kapasitas masyarakat misikin perkotaan untuk mampu membentuk serta melembagakan representative masyarakat yang akuntabel terhadap masyarakat.
b. Penyediaan akses secara langsung ke sumber daya kunci yang dibutuhkan mayarakat miskin, dalam bentuk dana bantuan langsung masyarakat (BLM) scecara transparan dan akuntabel.
c. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk bermitra dengan organisasi masyarakat warga dalam penyediaan serta pengembangan bantuan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET).

[34] Direktoral Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum,Pedoman Umum P2KP-3,(SKSP2KP, Jakarta 2005), hal. 7

Kemandirian masyarakat diharapkan dapat terwujud dengan mengimplementasikan pendekatan Tridaya. Pendekatan Tridaya pada hakekatnya merupakan pendekatan yang menekankan proses pemberdayaan sejati mendukung pembangunan berkelanjutan, yaitu pemberdayaan manusia seutuhnya agar mampu membangkitkan ketiga daya yang telah dimiliki manusia, yaitu daya sosial agar tercipta masyarakat efektif secara sosial, daya ekonomi agar tercipta masyarakat produktif secara ekonomi dan daya pembangunan agar tercipta masyarakat yang peduli dengan pembangunan agar tercipta lingkungan yang lestari.

Hal tersebut diatas juga didasarkan pendekatan pembangunan bertumpu pada kelompok *(community bassed development approach),* dimana kelompok-kelompok dapat dibangun atas dasar berbagai ikatan pemersatu (kesamaan tujuan, kesamaan kegiatan, kesamaan domisili) yang pada dasarnya mengarah pada efisiensi, efektifitas serta mendorong tumbuh dan berkembangnya kapital sosial.

Langkah-langkah kegiatan atau proses yang dilaksanakan P2KP mencakup

1. Sosialisasi awal, melalui serangkaian diseminasi, lokakarya, dan membangun kesadaran (kepedulian) dari semua pelaku kunci (pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil / para pihak terkait

2. Serangkaian Rembuk Kesiapan Masyarakat, dan Refleksi Kemiskinan, untuk membangun kesadaran kritis dan tanggung jawab sosial, serta menumbuh kembangkan kembali nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip tata pengaturan kepemerintahanyangbaik

3. Kegiatan Pemetaan Swadaya, untuk mengenal, memahami, dan menggali persoalan kemiskinan yang ada di sekitar lingkungan wilayahnya.

4. Membangun organisasi dan kelembagaan masyarakat (BKM)dengan pembelajaran warga mengenai kepemimpinan yang berbasis nilai, aspiratif, dan akuntabel.

5. Perencanaan Partisipatif melalui sejumlah rembuk warga, dan penyusunan PJM Pronangkis di tingkat kelurahan.

6. Pembelajaran Prinsip Tri-Daya (Sosial-Ekonomi-Lingkungan),melalui pemanfaatan dana BLM, merencanakan, dan mengelola keberlanjutannya melalui Unit pengelola keuangan (UPK). Pemanfaatan dana BLM ini dapat berupa santunan sosial, pinjaman bergulir untuk pengembangan usaha mikro, dan pembangunan /perbaikan untuk prasarana dasar lingkungan permukiman

7. Membangun transparansi, akuntabilitas publik lembaga masyarakat (BKM/UPK) dan mengembangkan kontrol sosial di masyarakat.

8. Mengembangkan kemitraan antara masyarakat (BKM) dan instansi (dinas) pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola kegiatan pembangunan secara bersama.

9. Membangun jaringan dan kerjasama dukungan sumberdaya untuk penyaluran (channeling) berbagai kebutuhan program di masyarakat, seperti : pengembangan kapasitas (pelatihan); informasi pasar; dan menggalang / mobilisasi sumber-sumber kapital; baik dengan pemerintah daerah, berbagai organisasi masyarakat sipil (LSM, perguruan tinggi, asosiasi profesi), maupun dunia usaha (perbankan, misalnya

10. Memberikan insentif program *"Neighbourhood Development"*bagi BKM-BKM yang berkualifikasi "Mandiri" untuk melaksanakan (uji-coba swakelola) pembangunan lingkungan permukiman kelurahan terpadu (Neigbourhood Development) dengan menerapkan dan mengembangkan prinsip-prinsip good governance, terutama yang menyangkut efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kelurahan.

b) Sasaran, Pendekatan, Prinsip Dan Strategi P2KP

Sasaran utama pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir untuk modal usaha adalah rumah tangga miskin (berpendapatan rendah) di wilayah kelurahan/desa khususnya masyarakat miskin yang sudah diidentifikasi dalam daftar masyarakat miskin.[35] Indikator tercapainya sasaran tersebut meliputi:

a. Peminjam berasal dari rumah tangga miskin yang telah diidentifikasi dalam PJM Pronangkis dan telah masuk dalam daftar masyarakat miskin.

b. Minimal 30% peminjam adalah perempuan

c. Para peminjam dari rumah tangga miskin tersebut telah bergabung dalam Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) khusus untuk kegiatan ini beranggotakan minimal 5 orang

Pendekatan yang digunakan adalah dengan mengarahkan kegiatan pinjaman bergulir untuk modal usaha sebagai akses pinjaman masyarakat miskin

[35] Sulastri, Kasi Pemberdayaan dan Ekonomi Kelurahan Ladang Cakiah (*wawancara pribadi), 20* Juni 2016, di Kantor Kelurahan Ladang Cakiah.

yang saat ini belum mempunyai akses pinjaman ke lembaga keuangan lain melalui:

a. Kegiatan pinjaman bergulir untuk modal usaha dilaksanakan ditingkat kelurahan, dikelola secara profesional untuk menjaga keberlangsungan akses pinjaman bagi masyarakat miskin.
b. Transparansi atas pengelolaan dan kinerja UPK serta monitoring partisipatif oleh warga masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan dana masyarakat.
c. Penyediaan akses pinjaman yang jumlahnya maupun tingkat bunganya hanya menarik bagi kelompok masyarakat miskin.
d. Menggunakan sistem tanggung renteng kelompok sebagai alat kontrol pengelola (UPK) maupun kelompok peminjam (BKM).
e. Meningkatkan kapasitas kewirausahaan masyarakat melalui pelatihan ekonomi rumah tangga, kewirausahaan dan pembukuan sederhana.

Beberapa prinsip dasar dalam pemberian pinjaman bergulir untuk modal usaha yang perlu mendapat perhatian dari UPK antara lain adalah:

a. Dana BLM yang dialokasikan untuk kegiatan pinjaman adalah milik masyarakat kelurahan/desa sasaran dan bukan milik perorangan

b. Tujuan dipilihnya kegiatan pinjaman bergulir untuk modal usaha adalah dalam rangka membantu program penanggulangan kemiskinan dan oleh karenanya harus menjangkau warga masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran utama P2KP

c. Pengelolaan pinjaman bergulir berorientasi kepada proses pembelajaran untuk penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, serta kegiatan-kegiatan produktif lainnya.

d. Prosedur serta keputusan pemberian pinjaman harus mengikuti prosedur pemberian

pinjaman bergulir modal usaha standar yang ditetapkan

e. Manajer dan Petugas UPK harus orang yang mempunyai kemampuan dan telah memperoleh sertifikat pelatihan dasar yang diadakan oleh Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan

f. UPK telah mempunyai sistim pembukuan yang standar dan sistim pelaporan keuangan yang memadai

g. UPK mendapat pengawasan baik oleh BKM melalui Pengawas UPK maupun konsultan pelaksana melalui tenaga ahli dan fasilitator, atau pihak yang ditunjuk program.

c) Kelayakan Peminjam

BKM Peminjam dan anggotanya sebagai calon peminjam harus memenuhi kriteria kelayakan yang dipersyaratkan untuk mendapat pinjaman bergulir untuk modal usaha dari UPK. Hanya BKM dan anggota yang memenuhi kriteria kelayakan yang dapat dilayani oleh UPK. Dengan kata lain, BKM Peminjam dan anggotanya yang tidak atau belum memenuhi kriteria kelayakan tidak dapat

dilayani dan harus ada pendampingan terlebih dahulu sampai BKM Peminjam tersebut memenuhi kriteria kelayakan sebagai calon peminjam.[36]

d) Kriteria kelayakan BKM

a. BKM peminjam telah terbentuk dan anggotanya adalah warga miskin yang tercantum dalam daftar warga miskin.
b. BKM dibentuk hanya untuk tujuan penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin; (tidak semata-mata untuk pinjam).
c. BKM dibentuk atas dasar kesepakatan anggota-anggotanya secara sukarela, demokratis, partisipatif, transparan dan kesetaraan.
d. Anggota BKM termasuk kategori keluarga miskin sesuai kriteria yang ditetapkan sendiri oleh BKM/Masyarakat.
e. Jumlah anggota BKM minimal 5 orang.
f. Jumlah anggota BKM minimal 30% perempuan.
g. Mempunyai pembukuan yang memadai sesuai kebutuhan.
h. Semua anggota BKM menyetujui sistim tanggung renteng dan dituangkan secara tertulis dalam pernyataan kesanggupan tanggung renteng.
i. Semua anggota BKM telah memperoleh pelatihan tentang pinjaman bergulir, rencana usaha, kewirausahaan dan Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga (PERT) dari fasilitator dan BKM/UPK.

[36] Sulastri Kasi Pemberdayaan dan Ekonomi Kelurahan Ladang Cakiah *(Wawancara Pribadi)* tanggal 20 Juni 2016 di Kantor Kelurahan Ladang Cakiah.

j. BKM dapat mengakses pinjaman bergulir apabila membentuk kelompok dan minimal 3 bulan berturut-turut memiliki kegiatan untuk menggalang tabungan kelompok.

e) Ketentuan Pinjaman Bergulir

Ketentuan umum atau pinjaman bergulir untuk modal usaha dalam Program Penanggulangan kemiskinan Perkotaan. Peminjam dalam Pinjaman Bergulir ini adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang telah memenuhi kriteria minimal Badan Keswadayaan Masyarakat bukan individu (perorangan). Adapun anggota BKM peminjam harus memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:

1) Warga miskin yang tercantum dalam daftar masyarakat miskin

2) Mempunyai usaha atau akan memulai usaha bagi anggota BKM yang akan memulai usaha dapat diberikan fasilitas pinjaman bergulir apabila telah mengikuti pelatihan dari kegiatan sosial produktif usahanya menguntungkan dan dapat dikembangkan.

3) Mempunyai motivasi untuk mengembangkan usaha

4) Memerlukan tambahan modal kerja

5) Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman

6) Mendapat persetujuan keluarga

7) Usahanya tidak bertentangan dengan undang-undang, peraturan dan kesusilaan.[37]

Dengan adanya ketentuan ini sedikit masyarakat yang menjalankannya sesuai ketentuan setelah diberikan pinjaman oleh pihak P2KP untuk pengembalianya selalu diulur-ulur dan ada saja alasan untuk tidak mengembalikan pinjaman ini.[38]Berdasarakan wawancara diatas, dapat dipahami bahwa secara keseluruhan pelaku dari P2KP sudah menjalankan tugas dengan baik, namun yang menjadi permasalahan bagi masyarakat Ladang Cakiah yang kurang partisipasinya untuk menjalankan dan mensukseskan kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan.

f) Tujuan Penggunaan Pinjaman

Pinjaman diberikan untuk membantu kegiatan yang bersifat produktif dalam rangka menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja. Pinjaman dapat juga digunakan untuk memulai usaha baru yang tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, kesusilaan, dan tidak merusak lingkungan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pinjaman tidak dapat dipergunakan untuk tujuan menunjang kegiatan militer dan politik.[39]

Dalam penggunaan dana oleh masyarakat miskin masih ada masyarakat yang menggunakan dana untuk keperluan lain dan tidak digunakan untuk

[37] Sulastri, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kelurahan Ladang Cakiah, (*Wawancara Pribadi).* 20 Juni 2016.

[38] Sulastri, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kelurahan Ladang Cakiah, (*Wawancara Pribadi).* 20 Juni 2016.

[39] Sulastri, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kelurahan Ladang Cakiah, (*Wawancara Pribadi).* 20 Juni 2016. Di Kantor Kelurahan Ladang Cakiah.

memodali usahanya, hal ini akan mengakibatkan ketidakefektifan dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan.[40]Dari hasil wawancara, penggunaan dana oleh masyarakat tidak sesuai dengan tujuan peminjaman yang seharusnya digunakan untuk memodali usahanya, tetapi digunakan untuk hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan hal ini akan mengakibatkan angka kemiskinan tidak berkurang.

Pembiayaan bantuan modal usaha ini yang memanfaatkannya adalah masyarakat miskin tetapi banyak aparat lain yang menggunakan dana tesebut.[41]Dari hasil wawancara, pembiayaan modal yang diberikan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat miskin tetapi malah dinikmati oleh aparat lain, ini akan mengakibatkan tidak semua masyarakat miskin akan keluar dari garis kemiskinan.

g) Besar Pinjaman

Besar pinjaman mula-mula ditentukan maksimal Rp. 1.000.000,- per orang, namun disesuaikan dengan kemampuan membayar kembali peminjam. Artinya bahwa besar pinjaman pertama tersebut bisa lebih rendah dari Rp. 1.000.000,- apabila berdasarkan penilaian kebutuhan tambahan modal dan kemampuan membayar kembali yang bersangkutan memang hanya sebesar itu. Pinjaman berikutnya tergantung pada catatan pembayaran kembali dan kemampuan dana UPK, dapat diberikan pinjaman yang lebih besar memperoleh

[40] Sulastri, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kelurahan Ladang Cakiah, (*Wawancara Pribadi).* 20 Juni 2016. Di Kantor Kelurahan Ladang Cakiah.

[41] Bapak Irwan Masyarakat miskin di Kelurahan Ladang Cakiah (wawancara Pribadi) 26 Juni 2016.

pinjaman kembali lebih cepat dari daftar tunggu BKM yang lain (karena pembayaran kembalinya lebih baik), atau diberi jumlah yang sama dengan jasa pinjaman yang lebih rendah, dengan maksimum pinjaman sebesar Rp. 3.000.000. Kebijakan ini diatur lebih khusus oleh BKM sasaran penerima bantuan P2KP jangka waktu pinjaman dan frekuensi pinjaman jangka waktu pinjaman 3-12 bulan disesuaikan dengan kondisi usaha peminjam. Diharapkan dengan jangka waktu demikian pembelajaran kepada peminjam tentang pinjaman yang baik akan lebih cepat tercapai. frekuensi pinjaman masing-masing peminjam ditetapkan maksimal 4 kali yang bisa dibiayai dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Disamping itu BKM diharapkan mengupayakan chaneling atau mencarikan pinjaman ke Lembaga Keuangan lainnya.[42]

h) Angsuran Pinjaman

Angsuran pinjaman maksimal bulanan, tanpa adanya tenggang waktu (grace period), yang dimaksud grace period adalah adanya tenggang waktu peminjam tidak diwajibkan membayar, contoh jangka waktu 12 bulan grace period (GP) 3 bulan, maka peminjam sampai dengan bulan ketiga tidak diwajibkan mengangsur (kecuali bayar jasa), baru bulan keempat s/d bulan ke 12 setiap bulan diwajibkan mengangsur sehingga jumlah angsurannya jumlah pokok pinjaman saat realisasi dibagi 10 ditambah kewajiban jasa selama 12 bulan. Setiap angsuran pinjaman harus mencakup jasa dan pokok pinjaman. Apabila terjadi jumlah pembayaran yang tidak mencukupi untuk membayar keseluruhan jumlah

[42] Sulastri, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kelurahan Ladang Cakiah, (*Wawancara Pribadi).* 20 Juni 2016. Di Kantor Kelurahan Ladang Cakiah.

angsuran pokok dan jasa, maka prioritas pembayaran dilakukan menurut urutan jasa pinjaman, pokok pinjaman yang tetunggak, baru untuk pokok saat pembayaran. Ilustrasi pembayaran yang tidak mencukupi kewajiban pokok dan jasa

Misalnya kewajiban membayar setiap bulannya sebesar Rp. 240.000 (Pokok Rp. 200.000 dan jasa Rp. 40.000) BKM tersebut menunggak 3 kali angsuran (Pokok 600.000 dan jasa Rp. 120.000), apabila BKM tersebut hanya membayar Rp. 400.000 maka pembayaran angsurannya sebagai berikut :

1. Bagi pinjaman yang belum jatuh tempo apabila terdapat tunggakan diselesaikan per paket (pokok dan jasa) baru jasa dan pokok paket berikutnya yakni paket angsuran tunggakan pertama Pokok Rp. 200.000,- dan jasa Rp. 40.000,- selanjutnya sisanya sebesar Rp. 160.000,- untuk paket angsuran tunggakan berikutnya pokok Rp. 120.000,- dan jasa Rp. 40.000,-
2. Bagi pinjaman yang telah jatuh tempo maka pembayaran tersebut diselesaikan kewajiban jasa selama 3 bulan baru sisanya pokok yakni menjadi sbb: Pembayaran jasa sebesar Rp. 120.000,- sisanya untuk pembayaran pokok Rp. 280.000,-

Setelah diberikan pembiayaan, maka manfaat yang diperoleh oleh sipeminjam meningkatkan usaha dari peminjam, dengan adanya pembiayaan modal usaha yang diberikan pihak P2KP kepada masyarakat miskin dapat memberikan manfaat bagi peminjam yaitu meningkatkan perekonomian

masyarakat, meningkatnya pendapatan dan keluar dari garis kemiskinan dan tercapainya tujuan dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).

Program ekonomi juga menjadi prioritas dalam agenda penanggulangan kemiskinan oleh P2KP. Dan perlu diketahui bahwa pembangunan Kelurahan/Desa merupakan usaha individu atau usaha dari masyarakat Desa/Kelurahan yang didampingi oleh pimpinannya baik formal maupun informal guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu antara lain yaitu kebutuhan akan pangan, sandang, papan, memperoleh pendidikan, mendapatkan pelayanan yang baik. Tentunya upaya pemenuhan kebutuhan itu dilakukan oleh masyarakat Kelurahan/Desa dengan cara pengembangan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, dengan wawasan seperti ini maka pembangunan Kelurahan/Desa usaha sadar diri masyarkat Kelurahan/Desa itu.

Masih banyak dari para warga yang mendapatkan bantuan modal usaha yang tidak mampu menggunakan bantuan dana itu untuk usahanya sehingga tidak optimal bantuan modal yang diberikan kepada masyarakat**.**[43]Dari hasil wawancara, warga yang mendapatkan batuan modal usaha masih belum mampu mengoptimalkan dan menggunakan dana dengan sebaiknya sehinnga bantuan yang diberikan tidak optimal sehingga tidak tercapainya tujuan dari P2KP.

[43] Sulastri, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kelurahan Ladang Cakiah, (*Wawancara Pribadi).* 20 Juli 2016. Di Kantor Kelurahan Ladang Cakiah.

Dalam hal berwirausaha, pelatihan untuk mengembangkan usaha tersebut seperti diberikannya bantuan dana bergulir atau pinjaman modal usaha. Tentu saja program P2KP ini sangat tepat karena merupakan program peningkatan kesejahteraan dengan jalan pemberian kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri malalui peningkatan pengembangan jiwa kewirausahaan dengan cara pemberian dana bergulir (terutama masyarakat miskin dan komunitas/kelompok yang terpinggirkan), sehingga meningkatkan modal sosial masyarakat serta inovasi dan pemanfaatan segala sumber daya yang ada.

Jumlah pembiayaan yang diberikan kecil sehingga sulit memanfaatkan dana tersebut sehingga penggunaan dana tersebut kurang efektif sebaiknya lebih besar dan prosedur yang berbelit-belit susah dimengerti.[44] Dari hasil wawancara, jumlah pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat miskin terlalu kecil sehingga mereka sulit memanfaatkanya secara efektif apabila dana yang diberikan lebih besar lagi jadi pemanfaatanny akan lebih efektif

Pemberian pinjaman modal usaha atau dana bergulir, maka masyarakat Kelurahan Ladang Cakiah tentunya mempunyai persepsi masing-masing terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh pemberian pinjaman tesebut. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga Kelurahan Ladang Cakiah yang mendapatkan bantuan dana tersebut.

Sungguh sangat bagus program P2KP di Kelurahan ini. Bagaimana tidak, dengan programnya pemberian dana bergulir ataupun pemberian pinjaman modal

[44] Bapak Irwan Masyarakat Miskin Kelurahan Ladang Cakiah (*wawancara Pribadi),*28 Juni 2016.

usaha bagi masyarakat Kelurahan Ladang Cakiah. Alhamdulilah dengan pinjaman modal itu, saya bisa membangun kios tempat saya berjualan, dimana dengan penghasilan dari berjualan di kios itu saya dapat membantu menambah pendapatan suami saya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan angsuran tiap bulan yang tidak memberatkan, membuat warga di Kelurahan ini berbondong-bondong kepada fasilitator P2KP, bermohon untuk diberikan pinjaman modal usaha tersebut.[45]

Dari hasil wawancara, menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan pemberian dana modal usaha oleh P2KP kepada keluarga miskin di Kelurahan Ladang Cakiah, memberikan dampak yang begitu berarti bagi perkembangan dan kemajuan kehidupan perekonomian mereka. Hal inilah yang menjadi harapan dan orientasi dari sebuah program penanggulangan kemiskinan sekaligus harapan seluruh jajaran pemerintah. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan harus selalu senantiasa diarahkan pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat termasuk masyarakat miskin di perkotaan dengan mengedepankan berbagai metode atau pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Sebelum kami menyusun sebuah program penanggulangan kemiskinan, tentunya terlebih dahulu kami konfirmasi dengan pihak warga mengenai program apa yang tepat untuk digulirkan. Dengan demikian, masing-masing warga saling berkomunikasi dengan warga lainnya membicarakan program apa yang tepat untuk diterapkan dan kemudian mereka sepakat bersama-sama mengajukan usulan

[45] Ibu Yusna Masyarakat Miskin Kelurahan Ladang Cakiah *(wawancara Pribadi)* 28 Juni 2016.

program yang sama, termasuk mereka meminta untuk diberikan pinjaman modal. Setelah itu kami pun berusaha untuk mewujudkan kemauan mereka tersebut.[46]

Dari informasi di atas, ternyata pihak P2KP terlebih dahulu mengadakan konfirmasi kepada masyarakat di Kelurahan Ladang Cakiah untuk kemudian bersama-sama mengeluarkan keputusan mengenai program yang akan dilaksanakan. Dari kenyataan ini, sungguh bertolak belakang dengan pengakuan salah seorang warga Kelurahan Ladang Cakiah.

Memang pihak P2KP melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada warga sebelum dikeluarkannya keputusan, akan tetapi warga tersebut adalah mereka-mereka yang hanya dekat dengan fasilitator P2KP. Jadi wajar saja kalau keputusan yang dihasilkan adalah keputusan bersama. Beda halnya dengan kami yang tidak dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan itu yang memang saya merasa sangat pantas untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang telah disepakati tersebut, justru tidak pernah menikmati hal itu. Tentu ini adalah salah satu perbuatan pilih kasih pengurus P2KP, sehingga potensi salah sasaran atau salah orang untuk diberikan bantuan itu besar sekali.[47]

Dari hasil wawancara, tentu sangat disayangkan dengan munculnya pandangan itu. Betapa tidak, di tengah-tengah masyarakat lain berlomba-lomba membicarakan bantuan P2KP yang akan dicanangkan, ternyata ada pihak lain yang merasa terpinggirkan dengan urusan bantuan P2KP tersebut, padahal pihak

[46] Sulastri, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kelurahan Ladang Cakiah, (*Wawancara Pribadi).* 20 Juni 2016. Di Kantor Kelurahan Ladang Cakiah.

[47] Bapak Junaidi Masyarakat Miskin di Kelurahan Ladang Cakiah *(wawancara Pribadi),* 28 Juni 2016.

itu sangat pantas untuk ikut menikmati dan memanfaatkan semua program penanggulangan kemiskinan tersebut.

Pembiayaan yang diberikan tersebut belum mereta dan masih ada masyarakat miskin yang lainya yang layak mendapatkan tetapi tidak mendapatkanya, bantuan modal ini bagi saya belum terlaksana dengan baik dan prosedur mengenai pembiayaan itu saya kurang mengerti.[48]

Fenomena tesebut di atas, menjadi tolak ukur maupun indikator berhasil tidaknya sebuah program pengentasan kemiskinan, termasuk P2KP yang dilaksanakan di Kelurahan Ladang Cakiah. Sebuah program berhasil apabila hasil dari program tersebut membawa dampak yang begitu berarti bagi masyarakat. Artinya, ada perubahan ke arah yang lebih baik dari pada sebelumnya dengan adanya program penanggulangan kemiskinan tersebut.

Program ekonomi yang telah dilaksanakan oleh P2KP di Kelurahan Ladang Cakiah adalah dalam bentuk pemberian pinjaman modal usaha atau dana bergulir kepada keluarga miskin di Kelurahan Ladang Cakiah untuk digunakan sebagai modal untuk membuka sebuah usaha guna perbaikan taraf kehidupan eknonomi masyarakat, meskipun masih ada sebagian warga di Kelurahan Ladang Cakiah yang mempunyai persepsi bahwa program P2KP itu hanya diberikan kepada mereka-mereka yang hanya dekat dengan pihak-pihak penyelenggara P2KP, sehingga hal ini dapat menimbulkan tidak tepatnya sasaran program P2KP.

[48] Ibu Musinar Masyarakat Miskin di Kelurahan Ladang Cakiah *(wawancara Pribadi)* 28 Juni 2016

2. Ketentuan Pembiayaan Modal Usaha kepada warga miskin dilihat dari perspekti Ekonomi Islam di Kelurahan Ladang Cakiah.

Modal merupakan salah satu dari faktor-faktor produksi yang sering kita ketahui dalam ilmu ekonomi. Namun dalam praktiknya, modal dapat dikembangkan menjadi sebuah bisnis yang bisa mendatangkan keuntungan. Sedangkan dalam pengembangannya tidak semua modal dikembangkan dengan berlandaskan etika-etika yang benar dan baik. Misalnya yang sering kita jumpai adalah penanaman modal pada tempat-tempat sarang kemaksiatan, seperti diskotik, tempat prostitusi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Islam menberikan sebuah solusi tentang bagaimana menanamkan modal secara benar dari sudut pandang etika dan tentunya agama Islam.

Dalam konsep sistem ekonomi Islam, hak milik individu terhadap harta (termasuk kepemilikan atas modal produksi) pada dasarnya merupakan suatu amanat yang dititipkan Allah kepada hamba-Nya. Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan yang tak terbatas kepada individu untuk menggalakkan usaha secara perorangan, dan tidak pula menghapus semua hak individu dan menjadikan mereka budak ekonomi yang dikendalikan negara seperti yang ditekankan ekonomi sosialis. Akan tetapi, di bawah sistem ekonomi Islam, kepemilikan individu atas harta dan

pengembangannya tetap memiliki kebebasan dengan dibatasi ketentuan-ketentuan yang sesuai aturan-aturan Syari'ah.[49]

Modal sebagai salah satu faktor produksi dapat diartikan sebagai semua bentuk kekayaan yang dapat dipakai langsung atau tidak langsung dalam proses produksi untuk menambah out put-nya. Dalam pengertian lain, modal didefinisikan sebagai semua bentuk kekayaan yang memberikan penghasilan kepada pemiliknya atau suatu kekayaan yang dapat menghasilkan suatu hasil yang akan digunakan untuk menghasilkan kekayaan lain. Dari ketiga definisi di atas diketahui bahwa pada prinsipnya modal segala sesuatu yang memiliki peranan penting untuk menghasilkan suatu barang produksi dalam suatu proses produksi.

Dalam bahasa (arab) modal atau harta disebut *al-amal* atau *al amwal* istilah adapun dalam istilah syar'i, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut hukum islam. Dengan demikian dapat dikatakan, dapat dikatakan bahwa apapun bentuknya, baik barang maupun jasa, yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan di dunia adalah merupakan harta.

a. Pengumpulan Modal.

Pertumbuhan pendapatan tidak akan meningkat jika jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penghasilan. Oleh karena itu perlu dikurangi pengeluaran yang tidak perlu. Harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana sebuah

[49] Ahdasaifulaziz, *Kode Etik pengembangan Modal Dalam Islam* http ://.blogspot.co.id/2011/06/ -dalam.html, diakses pada tanggal 20 Juli 2016.

keinginan. Sehingga terhindar dari sifat yang berlebih-lebihan dan bergaya hidup mewah.

b.Pembekuan Modal

Hal ini akan memperlambat tingkat pembangunan ekonomi, sehingga menyebabkan kemiskinan. Oleh karena itu Islam melarang membekukan modal karena akan mengurangi jumlah modal yang akan digunakan untuk perdagangan maupun perindustrian.

c. Keselamatan dan keamanan

Apabila ada jaminan keselamatan dan keamanan dalam suatu Negara, maka rakyat akan lebih giat dalam bekerja dan mengumpulkan harta kekayaan.

d. Modal dan pengembangan bisnis

Islam mewajibkan umatnya untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu hal utama untuk bertahan di dunia ini. Dan juga salah satu pokok yang memungkinkan untuk mendapatkan harta kekayaan pengembangan bisnis yang memerlukan modal dalam islam harus berorientasi syariah, sebagai pengendali agar bisnis yang dijalankan sesuai dengan kaidah dan ajaran syariah. Syariah merupakan kendali bisnis untuk mencapai empat hal berikut :

1) Target

Tujuan perusahaan tidak hanya untuk mencapai profit setinggi-tingginya, tetapi juga harus memperoleh dan memberikan keuntungan non materi baik internal perusahaan maupun eksternal perusahaan, sepertinya terciptanya suasana persaudaraan kepedulian sosial, toleransi dan sebagainya. Islam memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya berorientasi pada *qimah madiyah*

tetapi juga berorientasi pada qimah lainya yaitu *qimah insaniyyah*, *qimah khulqiyyah* dan *qimah ruhiyyah*. *Qimah insaniyyah* berarti pengelola perusahaan juga dapat memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, bantuan sosial, dan yang lainya. *Qimah khulqiyyah* mengandung pengertian bahwa nilai akhlak mulia menjadi suatu yang harus dilakukan dalam setiap aktivitas pengelola perusahaan, sehingga tercipta hubungan yang baik. *Qimah ruhiyyah* berarti perbuatan tersebut dimaksudkan untuk menambah kedekatan kepada Allah.

2) Keberlangsungan Perusahaan

Orientasi perusahaan bukan hanya profit semata tetapi juga keberlangsungan hidup perusahaan. Pencapaian target dan profit harus terus dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu selama mungkin. Keberlangsungan hidup perusahaan perlu diutamakan setelah profit.

3) Keberkahan atau keridhaan Allah

Faktor keberkahan untuk mengapai ridha Allah merupakan puncak kkebahagian hidup manusia. Karena tidak selamanya kita hidup di dunia hidup di akhirat lebih lama dari pada didunia, makanya memerlukan bekal untuk kesana. Keberkahan akan tercapai jika diniatai dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntutan agama.

Menurut Islam harta pada hakikatnya adalah milik Allah, namun karena Allah menyerahkan kekuasaanya pada manusia, maka manusia berwenang untuk memanfaatkan dan mengembangkanya. Dalam mengembangkan modal, umtuk meningkatkan atau memperbanyak jumlah modal dengan berbagai upaya yang

halal, baik melalui produksi maupun investasi. Semua itu bertujuan agar harta bisa bertambah sesuai yang diinginkan. Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan yang tak terbatas kepada individu untuk menggalakkan usaha secara perorangan, dan tidak pula menghapus semua hak individu dan menjadikan mereka budak ekonomi yang dikendalikan negara seperti yang ditekankan ekonomi sosialis. Akan tetapi, di bawah sistem ekonomi Islam, kepemilikan individu atas harta dan pengembangannya tetap memiliki kebebasan dengan dibatasi ketentuan-ketentuan yang sesuai aturan-aturan syari'ah

Adapun bentuk-bentuk pengembangan modal menurut ketentuan syariah mu'amalah dapat dilakukan dalam bentuk atau pola sebagai berikut :

1 . Transaksi akad jasa, yaitu pengembangan modal di mana seseorang bertindak sebagai konsumen/pemakai jasa dan wajib memberikan harga kepada pihak yang telah memberikan jasa tersebut menurut kesepakatan yang dibuat, seperti dalam akad al-rahn, Sistem pengembangan dalam hal ini, ekonomi Islam memberikan batasan-batasan.

2. Cara mendapatkan modal (harta) dan mengembangkannya tidak dilakukan dengan yang dilarang Syari'at Islam. Antara lain pertama, dengan jalan perjudian, karena cara ini dapat menimbulkan permusuhan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya cara pengembangan ini dilakukan tanpa adanya usaha yang jelas dan hanya bersifat spekulasi semata. Kedua, pengembangan harta/modal dengan jalan riba (apapun bentuk dan jumlahnya), yaitu pengambilan keuntungan dengan cara mengeksploitasi tenaga orang lain.

Ketiga, pengembangan modal dengan jalan penipuan. Cara-cara penipuan dalam segala kegiatan ekonomi yang dilakukan di masyarakat jelas-jelas dilarang dan diharamkan agama. Keempat, pengembangan modal (harta) dengan jalan penimbunan. Maksudnya adalah seseorang mengumpulkan barang-barang dengan tujuan menunggu waktu naiknya harga barang-barang terebut, sehingga ia bisa menjualnya dengan harga tinggi menurut kehendaknya.

3. Menentukan mekanisme pengembangan dan pengelolaannya, di mana dalam mekanisme ini harus jelas cara atau bentuk serta tujuan yang akan dicapai. Prinsipnya adalah peningkatan dan pembagian hasil untuk menciptakan sirkulasi yang benar dan tepat bagi setiap golongan masyarakat dengan latar belakang berbeda.

4. Hak milik pribadi kadangkala dalam keadaan tertentu dapat berubah menjadi milik umum. Di antara hal penting yang diungkapkan ajaran Islam adalah penetapan antara pemilikan bersama menyangkut benda-benda yang bersifat dharuri (yang sangat dibutuhkan bagi semua manusia),

5. Mensuplai atau memberikan orang yang memiliki keterbatasan faktor-faktor produksi dengan ketentuan-ketentuan yang ada, seperti memberikan pinjaman modal untuk digunakan sebagai modal usaha sehingga dapat dikembangkan lagi menjadi lebih besar, ataupun dengan memberikan modal kepada seseorang dengan perjanjian membagi hasil yang didapat sesuai perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Ekonomi Islam dalam konsep pengembangan modal memberikan ketentuan-ketentuan yang jelas dan terarah, antara lain konsep pengembangan modal yang ditawarkan adalah dengan menyerahkannya pada tiap

individu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dengan catatan segala bentuk pengembangan yang akan dilakukan harus memenuhi ketentuan-ketentuan syariah yang ada sebagaimana yang diatur dalam syariah. Dengan demikian, dengan adanya pengembangan modal usaha yang dilakukan sesuai dengan sistem ekonomi Islam, diharapkan akan tercipta kondisi perekonomian masyarakat yang kondusif bagi pengembangan produksi. Kepemilikan atas faktor-faktor produksi dalam jumlah besar (khususnya modal) dapat dibatasi dan terkontrol dengan baik untuk menghindari tindakan sewenang-wenang pemilik modal terhadap mereka yang sangat butuh terhadap faktor produk.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penjelasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan. Salah satu program dari P2KP adalah dalam ekonomi yaitu dengan pembiayaan modal usaha kepada warga miskin sampai saat sekarang ini belum efektif.

Pinjaman diberikan untuk membantu kegiatan yang bersifat produktif dalam rangka menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja. Pinjaman dapat juga digunakan untuk memulai usaha baru yang tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, kesusilaan, dan tidak merusak lingkungan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pinjaman tidak dapat dipergunakan untuk tujuan menunjang kegiatan militer dan politik.

Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) ini yang pertama, adanya masyarakat yang mengunakan dana bukan untuk modal usaha tetapi digunakan untuk hal yang lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Kedua, belum meratanya dalam pendistribusian dana kepada masyarakat miskin. Ketiga, warga yang mendapatkan batuan modal usaha masih belum mampu mengoptimalkan dan menggunakan dana dengan sebaiknya sehingga bantuan yang diberikan tidak optimal. Keempat, penggunaan dana oleh masyarakat belum sesuai dengan tujuan peminjaman yang seharusnya digunakan untuk memodali usahanya, tetapi digunakan untuk hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan hal ini akan mengakibatkan angka kemiskinan tidak berkurang.

Dilihat dari perspektif Ekonomi Islam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) khususnya dalam pembiayaan modal usaha masih belum sesuai dengan syariah karena dalam Al-Qur'an suarat Al-Hasr ayat 7, berulang kali mengingatkan agar kaum muslim tidak menyimpan dan menimbun kekayaan untuk kepentingan mereka sendiri, tatapi mereka harus memenuhi kewajiban terhadap keluarga, tetangga, dan orang-orang harus mendapat bantuan, masih terjadi penyimpangan-penyimpangan baik dalam hal kejujuran, dalam Ekonomi Islam, penggunaan dana harus sesuai dengan kesepakatan semula dari maksud dan tujuan dana yang digunakan adanya proses transparansi dari penggunaan dan hasil prestasi dicapai. Pembagian hasil yang disepakati bersama secara adil. Tidak digunakan untuk membiayai bisnis terlarang menurut syariah, seperti bisnis perjudian (spekulasi), bisnis barang atau jasa maksiat.

B. SARAN

Dari kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian mengenai Program penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang belum saya teliti tentang infrastruktur dan sosialnya.
2. Kelurahan Ladang Cakiah harus lebih tegas lagi dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat miskin, sehingga masyarakat tidak menyalahgunakan pembiayaan yang diberikan.
3. Sebaiknya penyaluran pembiayaan modal usaha di Kelurahan Ladang Cakiah dilaksanakan dengan baik tanpa adanya penyimpangan dan pelanggaran yang

telah ditetapkan oleh syariah ataupun kebijakan oleh pemerintah.tentu pemerintah juga harus memperhatikan, mengawasi setiap kegiatan dalam pembiayaan modal usaha kepada masyarakat miskin.

4. Hendaknya pendataan masyarakat yang berhak mendapatkan modal usaha dilakukan lebih selektif lagi agar yang mendapatkan modal usaha tersebut tepat sasaran.
5. Dalam memberikan pembiayaan modal usaha harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam

DAFTAR PUSTAKA

Ala,Andre Bayo (Editor). (1981). *kemiskinan dan Strategi Memerangi kemiskinan*, Yogyakarta: Liberti.

Adiningsih, Sri, dkk. (2008). *Satu Dekade Pasca-Krisis Indonesia: Badai Pasti Berlalu?*. Yogyakarta: KANISUS (Anggota IKAPI).

Ahdasaifulaziz, Kode Etik pengembangan Modal Dalam Islam http ://.blogspot.co.id/2011/06/ -dalam.html.

Departemen Pendidikan Nasional. (2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Daryeni, Kasi Agama dan Sosbud Kelurahan Ladang Cakiah, (*Wawancara Pribadi).*

Hak, Nurul. (2011). *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah.* Yogyakarta: Teras.

Hartomo dan Arnicun Aziz. (1997). *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hartati, Partisipasi Masyarakat dan Efektifitas Pelaksanaan PNPM Mandiri Dalam Rangka Menanggulangi Kemiskinan Di Malalak Selatan, 2014 (tidak diterbitkan).

Kusuma, Sonny. (2006) P2KP-Urban Poverty Project, Http:// P2KP-Urban Poverty. Blogspot. com.

Muslich, M.M. (2007). *Bisnis Syariah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Muliadi, Ahmad.(2013). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta Barat: Akademia Permata.

Novia Ade Irma Suryani" analisis peran PKPU dalam mengentaskan kemiskinan melalui penyaluran zakat di Kecamatan Aur Tajungkang Sawah Kelurahan Tangah Sawah 2014" (tidak diterbitkan).

Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ridwan, Muhammad. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil BMT*. Yogyakarta: UII Press.

Rina, Elvita, Upaya program penanggulangan kemiskinan berbasis masjid (PPKBM) dalam peningkatan ekonomi masyarakat miskin Jorong Bingkudu Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang , *2015* (Tidak diterbitkan)

Ritongga, A. Rahman. (2013). *Memaknai Mustahik Zakat Dalam Konteks Kekinian*, Padang: Hayfa Press.

Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithal. (2006). *Kredit Management Hand Book.* Jakarta: PT Raja Grafindo.

Soedjatmoko. (1984). *Pembangunan dan Kebebasan*. Jakarta: LP3ES.

Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif,* Bandung: Alfabeta.

Trisnawati, Ratih. (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Usman, Husein dan Purnomo Akbar. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Ulwan, Abdullah Nashid. (2008). *Zakat Menurut 4 Madzhab*. Jakarta: Al- Kautsar.

Quraish shihab. *Wawasan Al-Qur'an*. diakses dari http:// Media Isnet. Org/Islam/Quraish/wawasan/ Miskin/Html.

Zulganef. (2013). *Metode Penelitian Sosial & Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

PEDOMAN WAWANCARA

Karyawan di Kantor Kelurahan Ladang Cakiah

Nama :

Jabatan :

1. Dari segi apakah Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) melihat masyrakat miskin pada Kelurahan Ladang Cakiah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, sehinga layak diberikan bantuan modal usaha?
2. Apakah menurut Bapak/Ibu dalam penggunaan dana oleh masyarakat miskin sudah sesuai dengan ketentuan?
3. Apakah setelah memberikan pembiayaan modal usaha, pihak Kelurahan melakukan pemantauan terlebih dahulu sebelum dana dicairkan?
4. Apakah setiap program yang akan digulirkan diberikan konfirmasi terlebih dahulu kepada masyarakat?
5. Apakah program yang dijalankan telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan?
6. Apakah ada pelatihan yang diberikan untuk masyarakat miskin untuk memulai usaha?
7. Bidang usaha apa sajakah yang mendapatkan bantuan modal usaha?
8. Apa saajak nilai-nilai yang terdapat dalam P2KP?

PEDOMAN WAWANCARA

Masyarakat miskin di Kelurahan Ladang Cakiah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Nama ;

Umur :

Pendidikan :

1. Menurut Bapak/Ibu apakah sudah terlaksanakah Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dalam mengurangi kemiskinan?

2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang pembiayaan modal uasaha dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan?

3. Apakah dengan adanya pembiayaan modal usaha ini, sudah meningkatkah perekonomian Bapak/Ibu?

4. Bagaimana seharusnya menurut saudara pembiayaan modal usaha agar pengembangan usaha meningkat?

5. Bagaimana menurut Bapak/Ibu sudah berhasilkah dari pembiayaan modal usaha yang dipinjamkan oleh P2KP?

6. Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu mengenai ketentuan pembiayaan modal usaha kepada masyarakat miskin?

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
KELURAHAN LADANG CAKIAH

Alamat :JalanSumua – Bukittinggi. *(0752) 35867* *KodePos 26135*

SURAT KETERANGAN

Nomor :450/94/Asb-Lc/VII-2016

Yang bertanda tangan dibawah ini **Lurah Ladang Cakiah** :

Nama : ARMEN.D.S.Sos

Jabatan : Lurah Ladang Cakiah

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan dibawah ini:

Nama : Yulia Safitri

Pekerjaan :Mahasiswa IAIN Bukittinggi.

Benar telah melakukan Penelitian di Kelurahan Ladang Cakiah,terhitung mulai tanggal 23 Mei 2016 s/d 30 Juni 2016

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 30 juni 2016

L U R A H

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KELURAHAN LADANG CAKIAH
KEC. AUR BIRUGO TIGO BALEH

ARMEN.D.S.Sos

NIP.19590821971982031003

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Panintauan Garegeh Bukittinggi, Sumatera Barat | Telp. (0752) 33136 Fax. (0752) 22875
Website : http://febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : In.26/3/PP.07/ /2016 Bukittinggi, Mei 2016
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth,
Walikota Bukittinggi
cq. Kepala Kantor Kesbangpol Linmas
Kota Bukittinggi
di-
Tempat

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara :

Nama	:	**Yulia Safitri**
NIM	:	3212. 114
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Semester	:	VIII
Lokasi Penelitian	:	Kelurahan Ladang Cakiah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi.
Judul Skripsi	:	***"Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kelurahan Ladang Cakiah Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi)."***
Waktu	:	23 Mei $^{s}/_{d}$ 23 Juni 2016

Demikianlah surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Dekan

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Telp. (0752) 23976 – Bukittinggi

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/475/KB-KKP/2016

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomenp dasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang :

a. Bahwa Sesuai Surat Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi Nomor In.26/3/PP.07/ /2016 Tanggal 18 Mei 2016 Perihal Mohon Izin Penelitian.
b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b, serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas Persyaratan Administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama	:	**YULIA SAFITRI**
Tempat/Tanggal Lahir	:	Batang Silasiah/28 Agustus 1992
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Barcco Jr. Batang Silasiah Kel. Bukit Batabuah Kec. Candung Kab. Agam
Nomor Identitas	:	1306146808920001
Judul Penelitian	:	Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kelurahan Ladang Cakiah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi)
Lokasi Penelitian	:	Kelurahan Ladang Cakiah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
Waktu Penelitian	:	23 Mei 2016 s.d 30 Juni 2016
Anggota Penelitian	:	-
Digunakan Untuk	:	Penyusunan Skripsi

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menghormati dan mentaati tata tertib di lokasi tempat Penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
3. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi.
4. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 20 Mei 2016
An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI
Kasubag Tata Usaha

ROBBY NOVALDI, SE, M. Ec. Dev
NIP. 19811124 200212 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi
3. Camat Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi
4. Lurah Ladang Cakiah Kota Bukittinggi
5. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Kampus I : Jl. Paninjauan Garegeh Bukittinggi | Kampus II: Jl. Gurun Aur Kubang Putih Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Telp. (0752) 33136, 34320 Fax. (0752) 22875 | Website : http://iainbukittinggi.ac.id e-mail : info@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

Nomor : In.26/PP.00.9/ 183 /2016

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an. **Yulia Safitri** NIM. **3212.114** tanggal 17 Mei 2016, perihal permohonan Pengesahan Judul Skripsi.

Menimbang :

a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :

1 Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul " **Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kelurahan Ladang Cakiah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi).** "

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama	:	**Dr. Iiz Izmuddin, MA**
NIP	:	19750303 200112 1007
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Tk.I (III/d) / Lektor Kepala
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqh Muamalah
Untuk Tugas	:	Pembimbing I

B
Nama	:	**Widya Syafitri, M.Pd**
NIP	:	19800726 201503 2002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Muda Tk.I / III/b / Cados
Bidang Keahlian Pokok	:	Bahasa Inggris
Memberi Mata Kuliah	:	Bahasa Inggris
Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 15 Juni 2016

Rektor,

RIDHA AHIDA

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : **YULIA SAFITRI**

NIM : 3212.114

Tempat/Tanggal Lahir : Bukibbatabuah/ 28 Agustus

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Belum Menikah

Alamat : Bareco, Kanagarian Bukikbatabuah, Batang Silasiah

Orang Tua :

Ayah : Bujang Datuak Palimo

Ibu : Anita

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 10 Ponggok Batang Silasiah, tahun 2001-2006
2. SMPN 2 Sungai pua, tahun 2006-2009
3. SMA Negeri 1 Sungai Pua, tahun 2009-2012
4. IAIN Bukittinggi, tahun 2012-2016

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN LADANG CAKIAH

